

**DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-MALAYSIA-FILIPINA
DALAM *MARITIME PATROL* INDOMALPHI (TMPI)
GUNA MENANGGULANGI ANCAMAN TERORISME
DI LAUT SULU, 2016-2020**

(Skripsi)

Oleh

BIMA RIZKY XANDITAMA



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2021**

ABSTRAK

Diplomasi Pertahanan Indonesia-Malaysia-Filipina dalam *Maritime Patrol Indomalphi* (TMPI) guna Menanggulangi Ancaman terorisme di Laut Sulu, 2016-2020

Oleh

Bima Rizky Xanditama

Aktivitas perompakan dan terorisme di wilayah Laut Sulu yang mencakup perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah menyebabkan berbagai kerugian baik secara ekonomi ataupun keamanan dan telah di kenal sebagai salah satu perairan berbahaya di dunia. Oleh karena itu, Indonesia bersama Malaysia dan Filipina, membentuk suatu kerangka kerja sama kemaritiman yang disebut dengan *Trilateral Maritim Patrol Indomalphi* (INDOMALPHI) yang bertujuan untuk menanggulangi ancaman terorisme. Penelitian ini menganalisis diplomasi pertahanan dalam implementasi *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* (TMPI) guna menanggulangi ancaman terorisme di Laut Sulu dalam rentan waktu 2016-2020. Selain itu, juga dijelaskan berbagai ancaman terorisme di Laut Sulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder melalui studi kepustakaan penelusuran data online, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh khususnya dari laman resmi Kementerian Pertahanan dan juga laman resmi kedutaan besar Malaysia dan Filipina di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan mengacu pada konsep diplomasi pertahanan, konsep kerja sama internasional, dan konsep keamanan maritim. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa Kerjasama Internasional yang dibangun melalui kesepakatan ketiga negara, menghasilkan TMPI yang memberikan efisiensi dalam mengatasi ancaman dengan tujuan memanfaatkan kesamaan kepentingan dalam melindungi keamanan maritim atas aktivitas perompakan dan terorisme.

Kata Kunci: *Trilateral Maritime Patrol*, Kerja Sama, Indonesia-Malaysia-Filipina

ABSTRACT

Indonesia-Malaysia-Philippines Defense Diplomacy in the Indomalphi Maritime Patrol (TMPI) to tackle the Threat of Terrorism in the Sulu Sea, 2016-2020

By

Bima Rizky Xanditama

Piracy and terrorism activities in the Sulu Sea region which includes the waters of Indonesia, Malaysia, and the Philippines have caused various economic and security losses and have been recognized as one of the most dangerous waters in the world. Therefore, Indonesia, together with Malaysia and the Philippines, formed a maritime cooperation framework called the Indomalphi Trilateral Maritime Patrol (INDOMALPHI) which aims to tackle the threat of terrorism. This study analyzes defense diplomacy in the implementation of the Trilateral Maritime Patrol Indomalphi (TMPI) in order to overcome the threat of terrorism in the Sulu Sea in the 2016-2020 period. In addition, various threats of terrorism in the Sulu Sea were also explained. The data used in this study are secondary data types through online data retrieval literature studies, interviews and documentation obtained especially from the official website of the Ministry of Defense and also the official website of the Malaysian and Philippine embassies in Indonesia. This study uses qualitative research methods and with reference to the concept of defense diplomacy, the concept of international cooperation, and the concept of maritime security. The results of this study show that International Cooperation which was built through the agreement of the three countries, produces TMPI which provides efficiency in overcoming threats with the aim of utilizing common interests in protecting maritime security against piracy and terrorism activities.

Keywords: Defense Diplomacy, Trilateral Maritime Patrol, Cooperative Relationship

**DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-MALAYSIA-FILIPINA
DALAM *MARITIME PATROL* INDOMALPHI (TMPI)
GUNA MENANGGULANGI ANCAMAN TERORISME
DI LAUT SULU, 2016-2020**

**Oleh
BIMA RIZKY XANDITAMA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-
MALAYSIA-FILIPINA DALAM MARITIME
PATROL INDOMALPHI (TMPI) GUNA
MENANGGULANGI ANCAMAN TERORISME
DI LAUT SULU, 2016-2020**

Nama Mahasiswa : **Bima Rizky Xanditama**

Nomor pokok mahasiswa : 1746071013

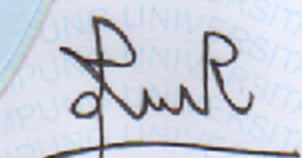
Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



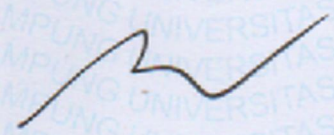


Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A.
NIP 19860428 201504 1 004



Robi Rakhmadi, S.Sos., M.Si.
NIP 19900606 201903 1 000

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**

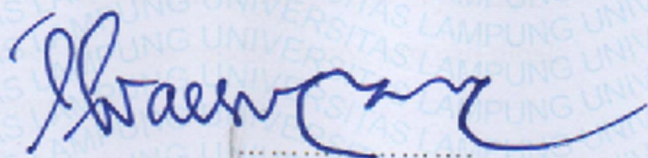


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

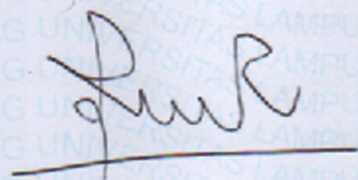
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

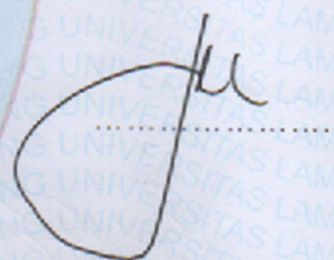
Ketua : **Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**



Sekretaris : **Robi Rakhmadi, S.Sos., M.Si.**



Penguji : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **08 Oktober 2021**



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung

Bandar Lampung, 22 September 2021

Yang membuat pernyataan



Bima Rizky Xanditama

NPM. 1746071013

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Bima Rizky Xanditama. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 Oktober 1999, sebagai anak pertama dari 4 bersaudara buah hati Bapak Fahmi Xandius dan Ibu Yeni Andriyani. Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya di Taman Kanak-kanak Yayasan Wanita Kereta Api pada tahun 2004. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 6 Muara Enim pada tahun 2010, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Muara Enim pada tahun 2013, menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Muara Enim pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2017 melalui jalur seleksi masuk Pararel. Selama menjadi mahasiswa penulis sempat aktif dalam beberapa kegiatan di Jurusan, seperti menjadi bagian dari Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional periode 2019-2020 pada *Divisi External Relations Business Development*, Penulis turut berpartisipasi dalam kegiatan HMJ Hubungan Internasional Universitas Lampung yaitu dalam Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia XXX 2018 tergabung dalam divisi publikasi dan penulis juga berpartisipasi mengikuti kegiatan Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia XXXI 2019 di Universitas Wulawarman, penulis juga telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tembelang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2020 dan telah melaksanakan program Pelatihan Kerja Lapangan di *Urban and Regional Development Institute (URDI)* pada tahun 2020.

Motto

*be grateful, enjoy, appreciate every process, life is already difficult so don't
complain a lot*

-X

*Whether I fail or succeed does not depend on others. I am the one who
motivates myself*

-XXXTENTACION

Persembahan

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk kedua orang tuaku Bapak Fahmi Xandiyus dan Ibu Yeni Andriyani yang selalu memberikan motivasi, materi dan juga doa.

Untuk dosen-dosen yang telah membimbing, berbagi ilmu dan menjadi mentor diskusi sejak awal penulis masuk jurusan Hubungan Internasional hingga sekarang.

Dan terima kasih segalanya teruntuk Almamater tercinta, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan Hidayah nya lah skripsi ini dapat di selesaikan.

Skripsi dengan judul “**Diplomasi Pertahanan Indonesia-Malaysia-Filipina Dalam *Maritime Patrol Indomalphi* (TMPI) guna Menanggulangi Ancaman Terorisme di Laut Sulu, 2016-2020**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kelancaran, kemudahan, dan ridho-nya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ida Nurhaida, M.si., selaku Dekan FISIP, Univeritas Lampung.
3. Ibu Dr. Ari Damarstuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung.
4. Mas Iwan Sulisty, S.Sos.,M.A., Dosen Pembimbing Utama skripsi dan Pembimbing Akademik penulis. Terima kasih atas jasa, ilmu, waktu, saran, masukan, yang sangat berguna terhadap pengembangan diri penulis. Mohon maaf apabila terdapat perkataan ataupun tindakan penulis yang tidak baik secara sadar maupun tidak, sukses selalu untuk mas tyo

5. Bapak Drs. Agus Hadiawan., M.Si selaku Dosen Pembahas Terima kasih atas segala ilmu, saran, masukan dan telah membantu penulis dalam memperbaiki penulisan skripsi. Mohon maaf apabila terdapat perkataan dan tindakan penulis yang tercela, baik secara sadar ataupun tidak
6. Mas Robi Rakhmadi, S.Sos.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing Pendamping terima kasih atas waktu, arahan dan juga motivasi nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Mohon maaf apabila terdapat perkataan dan tindakan penulis yang tercela, baik secara sadar ataupun tidak.
7. Ayah Fahmi Xandius dan Bunda Yeni Andriyani Terima kasih sudah menunggu dengan ikhlas sampai penulis dapat menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas segala jerih payah sudah dilakukan untuk penulis, kasih sayang, dukungan baik moril dan materil, serta doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam jika selama ini telah mengecewakan dan selalu menyusahkan. Semoga ayah dan bunda diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
8. Teman-teman Pe-juang kuliah Lina, Fauji, Darra, Pande dan Trima selaku teman seperjuangan yang penulis sayangi, terima kasih atas semua dukungan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripisi ini hingga selesai terima kasih telah mau bahu membahu menyelesaikan semua tugas yang di berikan dosen dengan seksama dalam beberapa tahun ini dan berbagi suka dan duka, semoga semua bisa mencapai sukses kita masing-masing.

9. Naufal yulizar, Bagus Alif, Adil, Noprita, Rendi, Paris, Mahardika, Zulham Celluler selaku teman perkuliahan. Terima kasih telah menghadirkan tawa, keceriaan dan berbagi suka dan duka selama perkuliahan ini dan tawa kalian telah menemani dari awal kuliah hingga akhir ini semoga kalian semua bisa menggapai semua impiannya dan menjadi pribadi yang sangat baik kedepannya.
10. Dosen-dosen Jurusan Hubungan Internasional, terima kasih atas seluruh ilmu yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir hingga selesai.
11. Untuk orang-orang yang belum disebutkan dan tidak mungkin untuk disebutkan. Penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya, yang pernah terjadi dahulu telah membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua. Amin

Bandar Lampung, 05 Oktober 2021

Bima Rizky Xanditama

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Konseptual	20
2.2.1 Konsep Diplomasi Pertahanan.....	20
2.2.2 Konsep Kerja Sama Internasional	24
2.2.3 Konsep Keamanan Maritim	26
2.3 Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Tingkat Analisis	31
3.3 Fokus Penelitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM	36
4.1 Gambaran Umum Negara-Negara kawasan Asia Tenggara	36
4.2 Gambaran Umum Keamanan Maritim Di Laut Sulu	39

4.3 Program kerja sama <i>Trilateral Maritime Patrol Indomalphi</i> (TMPI)	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	48
5.1 Ancaman Terorisme di Laut Sulu dari 2016-2020	49
5.2. Analisis Diplomasi Pertahanan dalam Implementasi <i>Trilateral Maritime Patrol Indomalphi</i> guna Menanggulangi Ancaman Terorisme di Laut Sulu	52
• Pertemuan Bilateral maupun Multilateral antara Pejabat Militer dan Pejabat Sipil Lembaga Pertahanan Negara	60
• Penunjukan Atase Pertahanan Negara ke Luar Negeri	64
• Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Bilateral ataupun Multilateral	68
• Pelatihan Personel Militer atau Pejabat Sipil Lembaga Pertahanan Negara lain	71
• Penyediaan Keahlian dan Saran Tentang Kontrol yang Demokratis terhadap Angkatan Bersenjata, Manajemen Pertahanan, dan Bidang Teknis Militer	74
• Pertemuan dan Pertukaran antara Personel Militer dan Kunjungan Kapal Perang	75
• Penempatan Personel Militer atau Pejabat Sipil Lembaga Pertahanan di Lembaga Pertahanan Negara Lain	77
• Pengerahan Tim Latihan	78
• Penyediaan Perlengkapan Militer serta Barang Bantuan Lainnya	80
• Latihan Perang Bilateral atau Multilateral	81
5.3 Faktor Lain yang Mempengaruhi Menurun nya Kasus Pembajakan dan Perompakan : Operasi Militer Filipina dan Grilayawan Muslim Mindanao	83
BAB VI PENUTUP	86
6.1 Kesimpulan	86
6.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	19
2.1 Aktivitas Diplomasi Pertahanan.....	22
4.1 Profil 11 negara Asia Tenggara.....	37
5.1 Data keamanan maritim di Laut Sulu.....	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Kerangka Pemikiran.....	29
4.1 Insiden Pembajakan di Asia Tenggara.....	41
4.2 Peta wilayah Laut Sulu.....	42
5.1 Port Visit di Tarakan Kalimantan utara.....	45
5.2 Letak pusat Komando Maritim.....	46
5.3 Rute patroli maritim trilateral.....	57
5.4 Dokumen deklarasi TCA	58

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>The Association of Southeast Asian Nations</i>
ARF	: <i>ASEAN Regional Forum</i>
AMF	: <i>ASEAN Maritime Forum</i>
CBM	: <i>Confidence Building Measures</i>
IUU	: <i>Illegal, Unreported and Unregulated</i>
MILF	: <i>Moro Islamic Liberation Front</i>
MNLF	: <i>Moro National Liberation Front</i>
UNCLOS	: <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
PD	: <i>Preventive Diplomacy</i>
TCA	: <i>Trilateral Cooperation Arrangement</i>
TMPI	: <i>Trilateral Maritime Patrol</i>
ICoCCC	: <i>International Court of Commerce Commercial Crime Services</i>
ReCAAP	: <i>Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan letak geografis yang strategis karena dihimpit oleh jalur perdagangan antara dua Samudera Hindia dan Pasifik. Dalam skala global, sektor kelautan menguasai sekitar 80% perdagangan dunia dan menyumbang 75% perdagangan laut global. Hal ini juga berdampak pada perdagangan minyak yang di dominasi jalur laut. Sekitar 35 juta barel minyak dipertukarkan melalui jalur laut setiap hari (UNCTAD, 2018). Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan penting dalam jalur perdagangan maritim dunia (BPPK Kemlu, 2016).

Menurut Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI) Periode 2019-2024, Budi Karya Sumadi, letak Indonesia dihimpit jalur perdagangan dunia yang berharga, yaitu perairan Selat Malaka, Sunda dan Lombok. Ketiga perairan itu dilalui oleh semua kapal dari Eropa yang akan menuju ke wilayah timur ataupun ke Benua Australia dan membuat Indonesia menjadi kunci pokok dalam alur pelayaran dunia karena posisinya yang strategis (Firmansyah, 2019).

Lokasi yang strategis juga membawa keuntungan bagi Indonesia, dengan jumlah pulau mencapai 17.491 ribu. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Investasi Indonesia (Kemenkoarves) pada Desember 2019. Indonesia

berbatasan langsung dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti dengan Malaysia, Singapura, Timor Leste dan Filipina yang negaranya sangat dekat dengan perbatasan Indonesia. Perbatasan Indonesia dipisahkan oleh laut dan darat yang berdampak positif dan negatif bagi Indonesia karena letak negara tersebut (Chairil & Siregar, 2020).

Pengaruh positif dari keadaan geografis ini adalah Indonesia dapat dengan mudah mengajukan dan bekerja sama dengan berbagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia di hampir semua wilayah, pada saat yang sama juga membawa hal-hal seperti *illegal entry*, pembajakan bersenjata oleh kapal, dan terorisme maritim. Efek negatif seperti obat-obatan komersial. Penyelundupan penduduk, *illegal fishing* dan konflik maritim antar negara, oleh karena itu hal ini menjadi masalah yang harus diselesaikan Indonesia dalam waktu yang lama (Widiyani, 2020).

Tantangan yang dihadapi Indonesia menurut Hasjim Djalal, seorang pakar dibidang hukum laut internasional, didalam suatu konferensi *Maritime Challenges and Priorities in Asia*, di *Nanyang Technological University of Singapore*, Indonesia harus dapat mengidentifikasi batas-batas wilayahnya, terlebih lagi batas dalam wilayah perairannya yang sering menimbulkan konflik. Masih menurut Djalal, Indonesia sejauh ini belum dapat membatasi perairan pedalaman sebagai halnya yang diatur oleh *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada tahun 1982, meski begitu Indonesia telah membenahi perairan kepulauannya (Rajaratnan School of International Studies (RSIS), 2010).

Tantangan selanjutnya yaitu penegakan hukum laut di Indonesia serta penegakan hukum lintas batas yang membutuhkan kerja sama bilateral atau multilateral yang berhubungan dengan tantangan terbaru yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan negara di kawasan Asia Tenggara yaitu terorisme yang tengah menjadi permasalahan utama yang mengancam wilayah perbatasan di Indonesia (Rajaratnan School of International Studies (RSIS), 2010).

Keadaan geografis Indonesia membuat terdapat beberapa wilayah perairan yang terbuka seperti Alur Pelayaran Sibuntu merupakan selat yang berada di perbatasan Malaysia-Filipina dan berdekatan juga dengan perbatasan Indonesia-Malaysia-Filipina, selain dilalui kapal-kapal yang akan pergi ke arah ALKI 2, lokasi selat ini juga bertempat di Pulau Tawi-Tawi, Pulau Jordan dan Pulau Balan dekat Kepulauan Sulu adalah tempat persembunyian organisasi teroris Abu Sayyaf (Wiranto, 2018).

Oleh sebab itu lah, Indonesia dipacu untuk mengadakan suatu kerja sama dalam upaya mencari solusi permasalahan tersebut. Kerja sama juga terjadi bukan antara individu saja aka tetapi juga terjadi antara entitas bersama termasuk perusahaan, partai politik, organisasi, ras, bangsa, dan organisasi teroris juga. Kerja sama antarnegara sangat penting untuk pemeliharaan *good order at sea* di Indonesia dan menjadi salah satu bentuk usaha Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan maritim (Dai, Snidal, & Sampson, 2010).

Untuk mengatasi permasalahan maritimnya, Indonesia telah menjalin hubungan kerja sama maritim dengan negara yang berada di Asia Tenggara melalui *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Negara anggota

ASEAN telah membentuk forum kerja sama regional yang berfokus pada masalah maritim, dengan pembentukan *ASEAN Maritime Forum* (AMF) pada tahun 2010. Dimana AMF diharapkan dapat memperkuat kerja sama di bidang kemaritiman di kawasan Asia Tenggara. Visi dan misi AMF adalah mendorong kerja sama maritim dan mencapai konsensus tentang isu maritim regional dan global, yang juga merupakan bagian dari langkah-langkah pembangunan kepercayaan (CBM) dan diplomasi preventif (PD) (Masyarakat ASEAN, 2016).

AMF berfokus pada dua tujuan utama dalam pembentukan yaitu pembahasan mengenai isu dan permasalahan strategis di laut dan juga berfokus pada kegiatan kerja sama antar badan sektoral ASEAN dan AMF (Masyarakat ASEAN, 2016). Meskipun telah menjalin kerja sama di forum *ASEAN maritime forum* (AMF) sejak tahun 2010 yang memiliki salah satu tujuan untuk membahas isu-isu strategis, Indonesia belum dapat memperbaiki pertahanan di wilayah perbatasannya.

Hal ini terlihat dari inisiatif tiga negara anggota AMF, Indonesia, Malaysia dan Filipina, mereka mengadakan pertemuan pernyataan bersama tentang wilayah maritim yaitu laut Sulu yang menjadi fokus bersama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah keamanan. Pertemuan dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2016. Perwakilan dari tiga negara hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu Menlu RI dan Menlu Malaysia Retno LP Marsudi, serta Menlu Datuk Seri Hanifa Oman, Filipina Jose Lei Ne D. Alamandez, Panglima Jenderal TNI Gato Nurmyanto, Jenderal Angkatan Darat Malaysia Datuk Seri Zukielfi Bin Mohd dan Angkatan Darat Filipina Wadham Kaiser Ta (*Card Agence France-Presse*)

(Satari, 2017). Pertemuan ini juga menjadi cikal bakal rangkaian kerja sama *Trilateral Cooperative Arrangement Indomalphi (TCA)*.

TCA Indomalphi ini secara umum memiliki beberapa tujuan dalam deklarasinya bersama Indonesia-Malaysia-Filipina salah satunya yaitu melaksanakan *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi (TMPI)* yang memakai aturan yang sebelumnya sudah ada klasifikasi untuk penyerahan bantuan langsung untuk keselamatan orang dan kapal dalam keadaan bahaya terorisme di kawasan Laut Sulu yang dikenal dengan nama *terrorist triangle*.

TMPI diresmikan pada 19 Juni 2017 di Tarakan, Kalimantan Utara, Kementerian Pertahanan dari ketiga negara menghadiri pertemuan tersebut yaitu Ryamizard Ryacudu Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Datuk Seri Hishamuddin Hussein Menteri Pertahanan Malaysia, dan Delvin N Lorenzana Menteri Pertahanan Filipina, yang mengadakan patroli maritim trilateral (Kementerian Pertahanan, 2017).

Kegiatan kerja sama TMPI ini direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk mengatasi tantangan keamanan terkait perairan perbatasan yang saat ini menjadi fokus perhatian di kawasan Laut Sulu-Sulawesi (Kementerian Pertahanan, 2017). Laut Sulu-Sulawesi menjadi wilayah yang difokuskan dalam kerja sama ini karena Laut Sulu juga dikenal sebagai *Tri Border Area (TBA)* yang merupakan jalur perdagangan alternatif setelah Selat Malaka, yang mana jalur perdagangan ini membawa komoditas dan juga batubara ke berbagai negara yang membuat banyaknya keuntungan komersil yang didapatkan ketiga negara yaitu Malaysia, Indonesia

dan Filipina (Espanilla, *Abductions at Sea: A 3-Way Security Challenge for Indonesia, Malaysia, and the Philippines: As Southeast Asian pirates turn to abductions, what can regional states do*, 2016).

Berdasarkan data setiap tahunnya, kurang lebih ada 50 juta metric ton barang dan 15 juta pelaku bisnis yang melintasi perairan Sulu-Sulawesi. Kemudian pada awal tahun 2016 (Rahmayah, 2016). banyak terjadi kasus kejahatan penculikan dan perampokan yang terjadi di Laut Sulu dimana menurut data *International Court of Commerce Commercial Crime Services*, pada 2015 telah terjadi 11 serangan yang melibatkan perempokan bersenjata di Laut Sulu. Lalu berlanjut pada bulan Maret dan April 2016 menurut *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP) para pelaku terorisme yang mengatas namakan kelompok Abu Sayyaf yang menyerang tiga kapal dan menculik 18 yang sebagian besar merupakan warga negara Indonesia dan para teroris ini meminta tebusan sangat tinggi untuk sandra. Oleh karena itulah Laut Sulu-Sulawesi merupakan kawasan penting yang harus lebih diperhatikan keamanannya. Apabila kriminalitas terus terjadi di kawasan tersebut, wilayah ini berpotensi menjadi jalur utama bagi para teroris yaitu kelompok Abu Sayyaf dan ISIS untuk berpindah ke ketiga negara yang bersebrangan dengan Laut Sulu, hal ini juga akan berpengaruh terhadap perekonomian dan pendapatan dari sektor maritim yang diperoleh Indonesia (ICoCCCS, 2016).

Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan maritim salah satunya kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara. Bergabungnya Indonesia dengan AMF merupakan suatu bentuk

diplomasi pertahanan Indonesia dalam berkerja sama dengan negara-negara lain. Akan tetapi Indonesia dengan AMF belum dapat menyelesaikan berbagai isu ancaman maritim yang ada.

Indonesia menjalin kerja sama dengan Malaysia dan Filipina dengan membentuk kerja sama *Trilateral Cooperative Arrangement Indomalphi* (TCA), dan salah satu program kerjanya yaitu *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* (TMPI) pada tahun 2016 dan sebelumnya ketiga negara juga pernah membentuk forum kerja sama non politik yaitu MALPHINDO yang berfokus pada kerja sama kebudayaan pada tahun 1963, kerja sama TMPI dibentuk meskipun Indonesia, Malaysia dan Filipina sama-sama telah tergabung dalam AMF. Hal ini juga membuktikan bahwa AMF yang posisinya sebagai forum regional gagal menyelesaikan masalah yang dihadapi Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Oleh karena itu, ini merupakan bentuk diplomasi pertahanan Indonesia untuk menanggulangi permasalahan terorisme di Laut Sulu. Indonesia memiliki persoalan terkait perbatasan di Laut Sulu sehingga apabila diplomasi pertahanan dan implementasi dari kerangka kerja sama TMPI berjalan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dari ancaman terorisme di Laut Sulu.

Dalam kerja sama TMPI antara Indonesia, Malaysia dan Filipina diplomasi pertahanan memiliki perananan penting hal ini berkaitan dengan kepentingan bersama dalam upaya ketiga negara menanggulangi ancaman terorisme, Cottey & Forster menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan adalah penggunaan angkatan bersenjata dan infrastruktur terkait yaitu Kementerian Pertahanan sebagai alat kebijakan luar negeri dan keamanan yang bertujuan dalam

mengatasi permasalahan bersama. (Cotter & Forster, 2004) Setiap negara yang terlibat dalam kerja sama pertahanan akan memberikan bantuan militer kepada negara lain untuk menyeimbangkan atau mencegah lawan, mempertahankan wilayah pengaruh, mendukung pemerintah untuk menekan lawan domestik atau mempromosikan kepentingan komersial (lebih luas lagi, penjualan senjata atau hubungan perdagangan) (Cotter & Forster, 2004).

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia memiliki berbagai tujuan bersama dalam kerja sama maritim dengan Malaysia dan Filipina. Meskipun Indonesia, Malaysia dan Filipina sebelumnya sudah tergabung dalam forum kerja sama non politik yaitu MALPHINDO pada tahun 1963 yang lebih berfokus dalam kerja sama kebudayaan, dan setelah itu ketiga negara tergabung dalam kerja sama pada tingkat kawasan Asean yaitu AMF akan tetapi karena AMF dinilai kurang efektif dalam menanggulangi isu perbatasan ketiga negara ini memilih untuk membentuk hubungan kerja sama maritim di luar AMF, yaitu dengan pembentukan TCA INDOMALPHI, yang menjadi hal yang penting untuk Indonesia karena permasalahan wilayah perbatasan yang cukup memprihatinkan, dengan adanya pintu masuk ilegal ke Indonesia dalam kerangka kerja sama ini difokuskan pada wilayah Laut Sulu yang keamanan perairan dan perbatasannya kurang terjaga sehingga mengakibatkan bebasnya pergerakan terorisme di wilayah tersebut yang dikenal sebagai *terrorist triangle*.

Lemahnya keamanan di perbatasan menyebabkan teroris mudah masuk ke Indonesia dan negara terdekatnya, seperti melakukan pembajakan, perompakan bersenjata terhadap kapal, perdagangan narkoba dan sebagainya. Oleh karena itu

peneliti akan menelaah mengenai Diplomasi Pertahanan dalam Implementasi *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* (TMPI) Berdasarkan yang dipaparkan di atas maka peneliti menjawab satu pertanyaan penelitian: **Bagaimana diplomasi pertahanan dalam implemntasi *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* guna menanggulangi ancaman terorisme di Laut Sulu ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan ancaman terorisme di Laut Sulu, dalam rentan waktu 2016-2020; dan
2. Menganalisis diplomasi pertahanan dalam implementasi *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* (TMPI) guna menanggulangi ancaman terorisme di Laut Sulu dalam rentan waktu 2016-2020

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis :

1. Penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori hubungan internasional, terutama teori-teori yang berkaitan dengan kerja sama internasional di bidang pertahanan.

Kegunaan Praktis :

1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kerja sama di bidang pertahanan dengan negara-negara.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi semua yang membutuhkan untuk penelitian ataupun yang lainnya, khususnya bagi mahasiswa jurusan hubungan internasional dan juga sebagai bahan penelitian mengenai diplomasi pertahanan, keamanan maritim dan kerja sama internasional

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdapat berbagai tinjauan pustaka, yang terbagi dalam tiga bagian. Setelah melakukan review terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk membantu penulis menentukan aspek kebaruan dari skripsi yang akan ditulis ini pada bagian pertama, pada bagian kedua akan disajikan landasan konseptual yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis hasil dari penelitian. Adapun bagian ketiga akan memuat kerangka pemikiran sebagai alur dalam menjawab pertanyaan penelitian.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis mengacu pada lima penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian penulis Diplomasi Pertahanan dalam Implementasi *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* (TMPI) Guna Menanggulangi Ancaman Terorisme di Laut Sulu 2016-2020. Penelitian **pertama** penelitian yang diteliti oleh Rifky Ardiansyah, mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia. Judul penelitiannya yaitu “Kerja sama *Trilateral* (Indonesia-Malaysia-Filipina) Melalui Program *Trilateral Maritime Patrol* INDOMALPHI untuk meningkatkan Keamanan Maritim di Laut Sulu-Sulawesi tahun 2016-2019”. Penelitian ini diteliti pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mengetahui kerja sama *Trilateral* (Indonesia, Malaysia, Filipina) melalui program *Trilateral Maritime Patrol* INDOMALPHI (TMPI) di Laut Sulu-Sulawesi penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dan menggunakan studi kepustakaan sebagai suatu cara dalam menghimpun datanya. Teori atau konsep yang dipakai penelitian ini yaitu kepentingan nasional dan keselamatan laut.

Dalam penelitian ini menjelaskan kerja sama *Trilateral Maritime Patrol* INDOMALPHI dimana terdapat tiga program kegiatan patroli yang secara langsung mengimplementasikan aksi dari patroli terkoordinasi diantara Indonesia, Malaysia dan Filipina di perairan Sulu-Sulawesi. Program yang dilakukannya seperti *Port Visit* INDOMALPHI, dalam melaksanakan patroli gabungan dan melaksanakan latihan militer gabungan diantara militer Indonesia, Malaysia dan Filipina (Ardiansyah, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 koordinasi antara ketiga negara di kawasan perairan Sulu-Sulawesi telah membuahkan hasil yang baik bagi masing-masing negara, seperti pengurangan kawasan Laut Sulu-Sulawesi, *Crime rate*, dan kerjasama semacam ini. juga memiliki signifikansi langsung. Dampak Wilayah Laut Sulu-Sulawesi Terhadap Keselamatan Maritim (Ardiansyah, 2020).

Dalam penelitian ini mampu memperlihatkan hasil dari kerja sama ketiga negara di perairan Sulu-Sulawesi, dengan penurunan tingkat kejahatan yang berdampak langsung dalam keamanan maritim di wilayah Laut Sulu-Sulawesi, akan tetapi dalam penelitian ini belum menjelaskan secara jelas bentuk kerja sama dan juga kepentingan setiap negara dalam melaksanakan kerja sama ini.

Perbedaan penelitian Rifky Ardiansyah dengan penelitian penulis adalah penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kerja sama trilateral melalui program

INDOMALPHI *Trilateral Maritime Patrol* (TMPI). Fokus penulis bertujuan untuk mengetahui, Bagaimana diplomasi pertahanan dalam implemtasi *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* guna menanggulangi ancaman terorisme di Laut Sulu ?

Penelitian **Kedua**, adalah penelitian yang berjudul Implementasi *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) INDOMALPHI merupakan hasil diplomasi pertahanan Indonesia mengatasi ancaman keamanan dari tahun 2016 hingga 2018 di Laut Sulu. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 oleh Ulfi Joanita, mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan studi pustaka untuk menggumpulkan data. Konsep yang dipakai untuk penelitian ini adalah konsep ancaman *non tradisional*, konsep diplomasi pertahanan, dan kerja sama keamanan regional (Joanita, 2019).

Penelitian ini bertujuan mengupayakan pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia untuk diplomasi pertahanan Indonesia setelah mengatasi ancaman keamanan di Laut Sulu dengan Malaysia dan Filipina. Pelaksanaan kerjasama TCA INDOMALPHI, dikarenakan adanya perampokan, penculikan, penyelundupan senjata dan narkoba ilegal yang sering terjadi di Laut Sulu kejahatan yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan, dampak komunitas internasional terhadap Indonesia, Malaysia dan Filipina, serta kerugian ekonomi (Joanita, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan adanya keberhasilan dari kerja sama TCA INDOMALPHI dalam upaya menanggulangi permasalahan keamanan di wilayah

Laut Sulu, yang berfokus pada permasalahan perompakan (Joanita, 2019). Akan tetapi dalam penelitian ini belum menjelaskan apa saja bentuk dari penerapan kerja sama TCA, dan juga diplomasi pertahanan Indonesia, terhadap Malaysia dan Filipina, tidak dijelaskan secara rinci sebagai bahan informasi bagaimana diplomasi yang dilakukan Indonesia sehingga dapat berkerjasama dalam bidang keamanan maritim dengan Malaysia, dan Filipina.

Perbedaan penelitian yang diteliti Ulfi Joanita laporan penelitian yang penulis buat, penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pertahanan dan diplomasi Indonesia dalam merespon berbagai ancaman keamanan di Laut Sulu, bagaimana pelaksanaan kerja sama TCA INDOMALPHI, dan laporan penelitian yang ditulis oleh penulis bertujuan untuk menentukan. Bagaimana diplomasi pertahanan dalam implementasi *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* guna menanggulangi ancaman terorisme di Laut Sulu ?

Penelitian **ketiga**, adalah jurnal yang ditulis oleh Sutrimo, Harangan Sitorus dan Muhammad Wirayudha Ramadhan yang merupakan dosen pascasarjana di Program Penelitian Diplomasi Pertahanan Nasional Unhan. Judul jurnal tersebut adalah "Diplomasi Pertahanan Organisasi Kerjasama Pertukaran Informasi Indonesia-Filipina untuk Anti Terorisme di Wilayah Perbatasan Indonesia dan Filipina". Jurnal ini didirikan pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan berbagai pengumpulan data primer dan sekunder melalui metode wawancara dan studi kepustakaan.

Jurnal tersebut memaparkan kerja sama antara Indonesia dan Filipina dalam pertukaran informasi dalam menangani isu terorisme kedua negara, untuk

menghadapi ancaman tersebut diperlukan kerja sama kedua belah pihak. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah pertukaran informasi dan kerjasama. Studi ini juga mengkaji dua hal utama terkait dengan implementasi pertukaran informasi dan kerja sama, serta mengapa terorisme di Filipina Selatan menjadi ancaman bagi Indonesia (Sutrimo, Sitorus, & Ramadhan, 2018).

Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa terorisme di Filipina Selatan secara baik secara langsung atau tidak telah mempengaruhi Indonesia, utamanya dalam pencapaian kepentingan nasional. Sehingga terdapat benturan kepentingan yaitu pertahanan, kepentingan ekonomi, sehingga pelaksanaan pertukaran informasi dan kerja sama belum terlaksana dengan baik, karena masalah pertama adalah masalah komunikasi internal dan eksternal, disusul masalah keuangan dan teknis (Sutrimo, Sitorus, & Ramadhan, 2018).

Akan tetapi dalam penelitian ini belum menjawab secara jelas judul dan juga tujuan penelitiannya dikarenakan penelitian ini lebih membahas berbagai kendala mengapa implementasi dalam kerja sama ini belum dapat diterapkan secara baik dan juga permasalahan yang dihadapi dari dampak dari adanya terorisme.

Perbedaan antara penelitian Muhammad Wirayudha dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada pertukaran informasi dan kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam merespon ancaman terorisme yang merupakan ancaman bagi kedua negara. Namun yang jelas masih terdapat beberapa kendala, sehingga hal ini jenis kerja sama tidak dapat dilakukan secara efektif. Tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui bagaimana diplomasi

pertahanan dalam implemntasi *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* guna menanggulangi ancaman terorisme di Laut Sulu ?

Penelitian keempat adalah jurnal Mochamad Andrey Apriana, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muravaman. Judul jurnal tersebut adalah “Kerjasama Trilateral di Perairan Sulu dalam Merespon Ancaman Maritim”. Konsep dan teori yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah konsep keamanan maritim, konsep *transnational crime*, dan konsep kerja sama. Dan menggunakan metodologi deskriptif untuk menggambarkan bagaimana kerja sama trilateral dalam menangani ancaman maritim di Laut Sulu, dan metode studi pustaka untuk mengumpulkan data teori dan konsep sebagai landasan pemikiran dan pembahasan.

Dalam penelitian ini untuk fokus dalam mengetahui kerja sama trilateral dalam menghadapi ancaman maritim di Laut Sulu, serta menjelaskan bagaimana Indonesia, Malaysia, dan Filipina menghadapi dan mencegah ancaman maritim di perairan Sulu-Sulawesi. Misalnya, salah satu ancaman transnasional Abu sering terjadi di Laut Sulu. Kelompok Sanyaf didirikan pada tahun 1989. Awalnya Ini adalah perpecahan antara Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang didukung oleh Abdurajak Abubakar Janjalani untuk melanjutkan upaya mendirikan negara Islam di Mindanao (Apriyana, 2019).

Hasil dari penelitian ini adalah Kerja sama *Trilateral* dalam penanganan ancaman maritim di laut adalah dengan melakukan patroli bersama di Laut Sulu, dengan pembuatan pusat komando maritim. Selain upaya preventif pemerintah

Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui kerja sama perjanjian pertukaran informasi, telah dilakukan latihan militer bersama yang berdampak positif bagi kehidupan ekonomi ketiga negara di Sulu, perairan dan sekitarnya (Apriyana, 2019).

Dalam penelitian ini berhasil memperlihatkan bahwa kerja sama patroli bersama di Laut Sulu, dengan dibentuknya pusat komando maritim dan diadopsinya langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui kerja sama perjanjian pertukaran intelijen dan latihan militer bersama, akan tetapi dalam penelitian ini belum membahas apa saja ancaman maritim yang ada di perairan Sulu karena dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *transnational crime*, yang seharusnya dipakai untuk menganalisis ancaman yang terjadi di Laut Sulu.

Perbedaan antara penelitian Mochamad Apriyana dengan penelitian penulis adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama trilateral dalam merespon ancaman Laut Sulu. Serta menjelaskan bagaimana ketiga negara menghadapi dan mencegah untuk mengatasi ancaman laut di Laut Sulu-Sulawesi. Meskipun penelitian penulis bertujuan untuk menemukan. Bagaimana diplomasi pertahanan dalam implemntasi *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* guna menanggulangi ancaman terorisme di Laut Sulu ?

Penelitian yang **kelima** yaitu jurnal yang ditulis oleh Fina Astriana, Muahamad Arif, Askabea Fadhila, Hana Hanifa, Vierna Wensatama, yang merupakan peneliti dari *ASEAN Studies Program ASEAN Briefs*. Judul penelitian ini *Joint Maritime Cooperation in the South China Sea: Lessons from*

the Indonesia-Malaysia-Philippines Trilateral Maritime Patrol (INDOMALPHI).

Teori yang dipakai dalam jurnal yaitu teori kerja sama dengan menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menjelaskan kerja sama kemaritiman Indoensia, Malaysia, dan Filipina.

Hasil dari penelitian ini adalah, kerja sama masih bisa berjalan meskipun adanya sengketa yang terjadi diantara negara-negara yang terlibat, inisiatif dari negara Asia masih bisa diterima tanpa adanya intervensi dari negara diluar kawasan Asia, tidak membatasi kerja sama maritim di Laut China Selatan, tetapi menjadi kerja sama yang lebih besar, tujuan dan ancaman yang harus dimitigasi perlu diidentifikasi, dan yang terakhir kerja sama di Laut China Selatan dapat dikembangkan seiring berjalan nya waktu (Astriana , Arif, Fadhila, Hanifa, & Wenstama, 2018).

Penelitian ini berfokus pada permasalahan konflik di Laut China Selatan yang dimana dalam mengatasi permasalahan tersebut dapat mengadaptasi dari kerja sama yang dijalin antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam *Trilateral Maritime Patrol* (INDOMALPHI). Akan tetapi dalam penelitian ini belum menjelaskan secara lebih mendalam mengenai kerangka kerja sama INDOMALPHI yang dapat di gunakan untuk meningkatkan kerja sama pada konflik Laut China Selatan.

Perbedaan antara studi ini dengan studi yang penulis buat adalah bahwa studi ini lebih fokus pada adaptasi kerjasama INDOMALPHI yang dapat digunakan dalam konflik Laut China Selatan. Meskipun penelitian penulis bertujuan untuk menemukan. Bagaimana diplomasi pertahanan dalam

implemntasi *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* guna menanggulangi ancaman terorisme di Laut Sulu ?

Agar lebih mudah melihat persamaan ataupun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, tabel berikut akan menyajikan persamaan dan perbedaan antara topik penelitian, jenis, objek , teori atau konsep, dan kesimpulan yang diajukan dalam tabel berikut 1.1.

Table 1.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

<i>Peneliti</i>	Judul	Fokus Utama	Hasil
<i>Rifky Ardiansyah (2019)</i>	Kerja sama Trilateral (Indonesia-Malaysia-Filipina) Melalui Program Trilateral Maritime Patrol INDOMALPHI untuk meningkatkan Keamanan Maritim di Laut Sulu-Sulawesi tahun 2016-2019	Kerja sama Trilateral (Indonesia, Malaysia, Filipina) melalui program <i>Trilateral Maritime Patrol INDOMALPHI</i> (TMPI) di Laut Sulu-Sulawesi	kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi sejak tahun 2016 telah memberikan hasil yang baik bagi setiap negara seperti menurunnya angka tingkat kejahatan di Laut Sulu-Sulawesi dan kerja sama ini juga berdampak langsung terhadap keamanan maritime di wilayah Laut Sulu-Sulawesi
<i>Ulfi Joanita (2019)</i>	Implementasi <i>Trilateral Cooprative Arrangment</i> (TCA) INDOMALPHI sebagai Hasil dari Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Keamanan di Laut Sulu Periode 2016 - Oktober 2018	Implementasi dari kerja sama TCA INDOMALPHI sebagai Hasil dari Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Keamanan di Laut Sulu	keberhasilan dari kerja sama TCA INDOMALPHI dalam menanggulangi ancaman keamanan di wilayah Laut Sulu, terutama pada kasus perompakan.
<i>Muhammad Wirayudha Ramadhan (2018)</i>	<i>Defense Diplomacy on The Indonesia-filipina Information Exchange Coopration Combatting Terrorisme in The Indonesia-Filipina Border Territory</i>	kerja sama pertukartan informasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina dalam menghadapi ancaman terorisme yang menjadi ancaman bagi kedua negara	Terrorisme di Filipina Selatan berdampak bagi Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak terjadi terutama pada pemenuhan kepentingan nasional Indonesia.
<i>Mochamad Andrey Apriana (2019)</i>	Kerja sama Trilateral dalam Menangani Ancaman Maritim di Perairan Sulu	kerja sama trilateral dalam menghadapi ancaman maritim di Laut Sulu. Serta menjelaskan	Melakukan patroli bersama di Laut Sulu, dengan pembuatan <i>Maritime Command Center</i> , dan kerja sama

		bagaimana penanganan dan pencegahan yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina	perjanjian pertukaran informasi intelejen, melakukan latihan militer
<i>Fina Astriana, Muahamad Arif, Askabea Fadhila, Hana Hanifa, Vierna Wensatama (2018)</i>	<i>Joint Maritime Cooperation in the South China Sea: Lessons from the Indonesia-Malaysia-Philippines Trilateral Maritime Patrol (INDOMALPHI).</i>	Penyesuaian kerja sama INDOMALPHI terhadap konflik Laut China Selatan	kerja sama masih bisa berjalan meskipun adanya sengketa yang terjadi diantara negara-negara yang terlibat, inisiatif dari negara Asia masih bisa diterima tanpa adanya intervensi dari negara diluar kawasan Asia, tidak membatasi kerja sama maritim di Laut China Selatan, tetapi menjadi kerja sama yang lebih besar, tujuan dan ancaman yang harus dimitigasi perlu diidentifikasi, dan yang terakhir kerja sama di Laut China Selatan dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu
<i>Bima Rizky Xanditama (2020)</i>	Diplomasi pertahanan Indonesia-Malaysia-Filipina dalam <i>Maritime Patrol Indomalphi</i> (TMPI) Guna Menanggulangi Ancaman Terorisme di Laut Sulu, 2016-2020	Bagaimana Diplomasi Pertahanan dalam Implementasi Kerangka Kerja sama <i>Trilateral Maritime Patrol</i> guna menanggulangi ancaman terorisme di Laut Sulu	

Sumber : diolah oleh peneliti

2.2 Landasan Konseptual

Landasan konseptual yang digunakan untuk penelitian ini penulis menggunakan suatu konsep yang berhubungan dengan diplomasi pertahanan dalam implementasi *Trilateral Maritime Patrol* (TMPI) guna menanggulangi ancaman terorisme di Laut Sulu, yaitu konsep diplomasi pertahanan, kerja sama internasional dan keamanan maritim.

2.2.1 Konsep Diplomasi Pertahanan

Upaya pertama dalam mendefinisikan konsep diplomasi pertahanan di kemukakan oleh kementerian pertahanan Inggris yang memperkenalkan konsep ini

ke *Strategy Defense Review*, pada tahun 1998 Inggris mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai penggunaan pertahanan secara damai untuk mencapai tujuan yang positif dalam mengembangkan hubungan bilateral dan multilateral dengan negara / negara tertentu (Drab, 2018).

Menurut mereka diplomasi pertahanan tidak mencakup operasi militer, akan tetapi mereka mengembangkan bentuk kerja sama seperti: pertukaran personel, kapal dan pesawat, kunjungan tingkat tinggi dan komandan senior, pertemuan dan dialog bilateral, pelatihan dan latihan forum pertahanan regional, bantuan militer, langkah-langkah pembangunan kepercayaan dan non-proferasi. Yang memiliki tujuan utama yaitu untuk menjaga suatu kepercayaan yang pada akhirnya dapat mengembangkan angkatan bersenjata yang lebih demokratis, dan dapat memberikan kontribusi yang baik untuk mencegah adanya suatu permasalahan ataupun ancaman dan juga resolusi konflik (Drab, 2018).

Sedangkan penjelasan yang lebih mendalam tentang diplomasi pertahanan negara. Menurut Iis Gindarsah (2015) dalam artikelnya yang berjudul "Diplomasi Pertahanan Indonesia: Menggunakan Strategi Hedging Terhadap Ketidakpastian Daerah", ia juga menjelaskan tentang tafsir diplomasi pertahanan. Ia menjelaskan dalam pidatonya bahwa setelah berakhirnya Perang Dingin, konsep diplomasi pertahanan negara mulai mengemuka. Ia meyakini bahwa diplomasi pertahanan negara merupakan transformasi fungsi militer menjadi *soft power tools* atau alat persuasif untuk mewujudkan agenda diplomasi. Diplomasi pertahanan negara juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan non-tempur yang dilakukan oleh aparat militer dan sipil Kementerian Pertahanan Negara, dengan tujuan untuk mencapai tujuan politik luar negeri dalam seluruh diplomasi nasional (Pajtinka, 2016).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa diplomasi pertahanan negara saat ini adalah diplomasi yang dilakukan oleh departemen pertahanan, tidak ada kegiatan diplomasi non tempur, melainkan metode negosiasi. Cottey dan Forster (2004) menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan negara adalah kerjasama penggunaan angkatan bersenjata dan infrastruktur terkait (khususnya Kementerian Pertahanan) sebagai alat kebijakan luar negeri dan keamanan. Mereka juga menyampaikan bahwa diplomasi pertahanan negara dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan opini atau opini yang berkaitan dengan kepentingan bersama (Cottey & Forster, 2004).

Negara-negara yang terlibat dalam kerja sama pertahanan dan memberikan bantuan militer kepada negara lain untuk menyeimbangkan atau mencegah lawan, mempertahankan wilayah pengaruh, mendukung pemerintah untuk menekan lawan domestik atau mempromosikan kepentingan komersial (lebih luas lagi, penjualan senjata atau hubungan perdagangan) (Cottey & Forster, 2004). Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perbedaan yang tajam, kerjasama pertahanan nasional tidak hanya digunakan untuk mendukung peran politik aktual dari pasukan dan keamanan sekutu, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan yang komprehensif (Cottey & Forster, 2004).

Table 1.2. Aktifitas Diplomasi Pertahanan

1.	Pertemuan bilateral maupun multilateral antara pejabat militer dan pejabat sipil lembaga pertahanan negara.
2.	Penunjukan atase pertahanan negara ke luar negeri.
3.	Perjanjian kerja sama pertahanan bilateral ataupun multilateral
4.	Pelatihan personel militer atau pejabat sipil lembaga pertahanan negara lain.
5.	Penyediaan keahlian dan saran tentang kontrol yang demokratis terhadap angkatan bersenjata, manajemen pertahanan, dan bidang teknis militer.
6.	Pertemuan dan pertukaran antara personel dan unit militer, serta

	kunjungan kapal perang.
7.	Penempatan personel militer atau pejabat sipil lembaga pertahanan negara di lembaga pertahanan negara lain.
8.	Pengerahan tim latihan.
9.	Penyediaan perlengkapan militer serta barang bantuan lainnya.
10	Latihan perang bilateral maupun multilateral.

Sumber: (Cotley & Forster, 2004, hal. 7)

Setidaknya ada 10 kegiatan untuk melaksanakan diplomasi pertahanan negara. Sepuluh kegiatan ini tercantum dalam Tabel 1.2. Itu semua adalah kegiatan yang diklasifikasikan dalam ruang lingkup diplomasi pertahanan negara. Kegiatan tersebut meliputi penggunaan personel militer serta PNS atau personel sipil di lembaga pertahanan pemerintah. Tentu saja, karena ada tanggung jawab yang tidak bisa diremehkan oleh setiap pemerintah, kegiatan ini membutuhkan kebijaksanaan semua pihak yang terlibat.

Menurut Tan See Seng dan Bhubhinder Singh mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai penerapan bersama yang terkoordinasi dari inisiatif damai kerja sama antara pertahanan dan kepemimpinan angkatan bersenjata untuk membangun kepercayaan, melawan krisis dan juga penyelesaian suatu konflik. Mereka juga membedakan dua fungsi diplomasi pertahanan: pragmatis dan transformasional, yang menurut mereka fokus pada pelestarian yang ada keadaan kerja sama dan keamanan, dua negara atau lebih, dan yang kedua difokuskan pada pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pemecahan krisis dan kembali ke keseimbangan, keamanan dan kerja sama (Tan & Sing, 2012)

Sesuai dengan fokus yang dikemukakan oleh Seeng Tan dan Singh diplomasi pertahanan dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana mekanisme kerangka kerja sama TMPI dalam menyelesaikan permasalahan

terorisme di Laut Sulu melalui dua fokus utama yaitu pragmatis dan transformasional dan juga akan di analisis dari sepuluh aktifitas diplomasi pertahanan yang di kemukakan oleh Cottey dan Forster apakah dalam kerja sama TMPI ini kesepuluh aktivitas tersebut telah berjalan dengan baik .

2.2.2 Konsep Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional merupakan suatu konsep dalam bentuk hubungan antar negara yang tujuan khususnya adalah untuk mewujudkan kepentingan masyarakat dan negara terkait. Kerja sama internasional sendiri terdapat berbagai bidang kerja sama seperti kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan negara, keamanan dan ekonomi, dengan menitikberatkan pada kebijakan luar negeri setiap negara (Ikbar, 2014).

Holsti (K.J. Holsti) mendefinisikan kerangka kerja analisis kerja sama internasional dalam bukunya "Politik Internasional" dan menggambarannya sebagai proses hubungan antar negara, negara-negara ini bekerja sama satu sama lain untuk mencari solusi atas masalah. Pembahasan mengenai pemecahan permasalahan tersebut dengan melihat faktor yang dapat mendukung adanya jalan keluar dan juga perundingan untuk dapat menyiapkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak atau yang terlibat (Holsti, 1988).

Kerja sama bisa terjadi di karenakan berbagai hal yang berbeda, dimana sering terjadi diantara dua pemerintah, ataupun lebih yang mempunyai kepentingan tertentu untuk menghadapi suatu permasalahan bersama, menurut K.J Holsti ada berbagai faktor terjadinya kerja sama dengan negara lain yaitu (Holsti, 1988):

- Dalam upaya untuk menaikkan tingkat kesejahteraan dalam hal perekonomian, dengan cara berkerja sama dengan negara lain sehingga negara dapat mengurangi jumlah biaya yang harus di keluarkan untuk suatu produk untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sehingga membuat kerja sama ini menjadi berhasil karena dapat membantu keterbatasan negara
- Peningkatan dan efisiensi sehingga dapat mengurangi biaya
- Adanya suatu ancaman yang membahayakan kedua belah pihak atau lebih
- Mengurangi tingkat defisit karena kerugian negatif karena tindakan individual negara yang akan berpengaruh terhadap negara lain

Selain itu ada beberapa ciri atau tingkah laku yang berbeda untuk melihat suatu kerja sama, kerja sama dapat di definisikan sebagai berikut (Holsti, 1988):

- Definisi jika terdapat dua kepentingan atau lebih, nilai ataupun tujuannya sama dapat menghasilkan sesuatu dan akan dapat dipenuhi oleh semua pihak
- Kesepakatan mengenai ancaman atau permasalahan tertentu oleh dua negara atau lebih dengan tujuan memanfaatkan kesamaan kepentingan.
- Adanya harapan jika saran atau kebijakan dari negara lain dapat membantu negara dalam upaya mencapai keinginannya
- Adanya suatu kebijakan baik resmi ataupun tidak dengan tujuan transaksi dimasa depan yang bertujuan untuk melaksanakan suatu kesepakatan.
- Transaksi antar negara yang bertujuan untuk memenuhi persetujuan mereka

Kerjasama TMPI adalah suatu kerjasama internasional melibatkan tiga negara dalam kerjasama ini yang pasti ketiga negara ini mempunyai kepentingan nasional masing-masing. Oleh karena itu peneliti menggunakan konsep kerjasama internasional dalam hal ini untuk melihat apa saja hal yang mempengaruhi Indonesia, Malaysia dan Filipina sehingga membuat suatu kerjasama TCA, yang dilihat melalui faktor-faktor yang telah di kemukakan oleh K.J Holsti.

2.2.3 Konsep Keamanan Maritim

Keamanan maritim saat ini menjadi satu fokus utama dalam permasalahan keamanan internasional. Para pelaku internasional nasional dan lembaga regional telah memasukkan semua yang terkait dalam keamanan maritim ke strategi pertahanan nasionalnya. Dalam keadaan tersebut konsep keamanan maritim mulai bermunculan dengan berawal dari perairan yang semakin penting dan strategis bagi semua negara di dunia. Hal ini karena wilayah perairan menjadi suatu jantung perekonomian global, dan isu mengenai keamanan maritim juga menjadi isu yang krusial dikarenakan harus adanya stabilitas keamanan maritim di setiap negara, akan tetapi definisi mengenai keamanan maritim sendiri dalam lingkup internasional belum dapat tercapai (BPPK Kemlu, 2016).

Akan tetapi sejalan dengan hal tersebut terdapat beberapa upaya untuk mendefinisikan keamanan maritim, contohnya seperti *absence of threats*, dalam hal ini seperti sengketa antar negara, ancaman terorisme, pembajakan, perdagangan ilegal dan contoh kejahatan yang lain-lain yang terjadi dikawasan perairan, dan keamanan maritim juga perlu dimaknai dimana suatu kondisi yang ingin mencapai stabilitas di laut (Buerger, 2015).

Karena negara memiliki kepentingan dan isu maritim yang berbeda, maka terdapat kesulitan dalam mendefinisikan keamanan maritim sebagai konsep politik tingkat tinggi dalam strategi internasional, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk membedakan definisi keamanan laut dari konsep keamanan maritim. Ini karena definisi ketat keamanan laut akan mengarah pada pengurangan berkelanjutan dari otoritas negara dalam pengelolaan laut (Buerger, 2015).

Walaupun belum ada suatu definisi ataupun konsensus keamanan maritim terdapat berbagai ciri khusus terkait keamanan maritim, seperti ancaman keamanan maritim tidak tergantung batas negara sehingga diperlukan kerja sama internasional dan tidak hanya mengutamakan kekuatan militer akan tetapi juga berfokus pada aktor negara, yang terakhir ditentukan oleh pandangan suatu negara, negara percaya bahwa sesuatu dapat mengancam stabilitas keamanan maritim (BPPK Kemlu, 2016).

Karakteristik ini mencerminkan bahwa keamanan maritim telah dipahami secara luas sebagai isu transnasional. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutamakan pentingnya kerja sama internasional dan tindakan penanggulangan yang terkoordinasi dalam laporan tahun 2008. Laporan Sekretaris Jenderal PBB juga menjelaskan bahwa keamanan maritim adalah masalah yang harus diselesaikan bersama dan membutuhkan pemahaman baru tentang keamanan kolektif (Buerger, 2015).

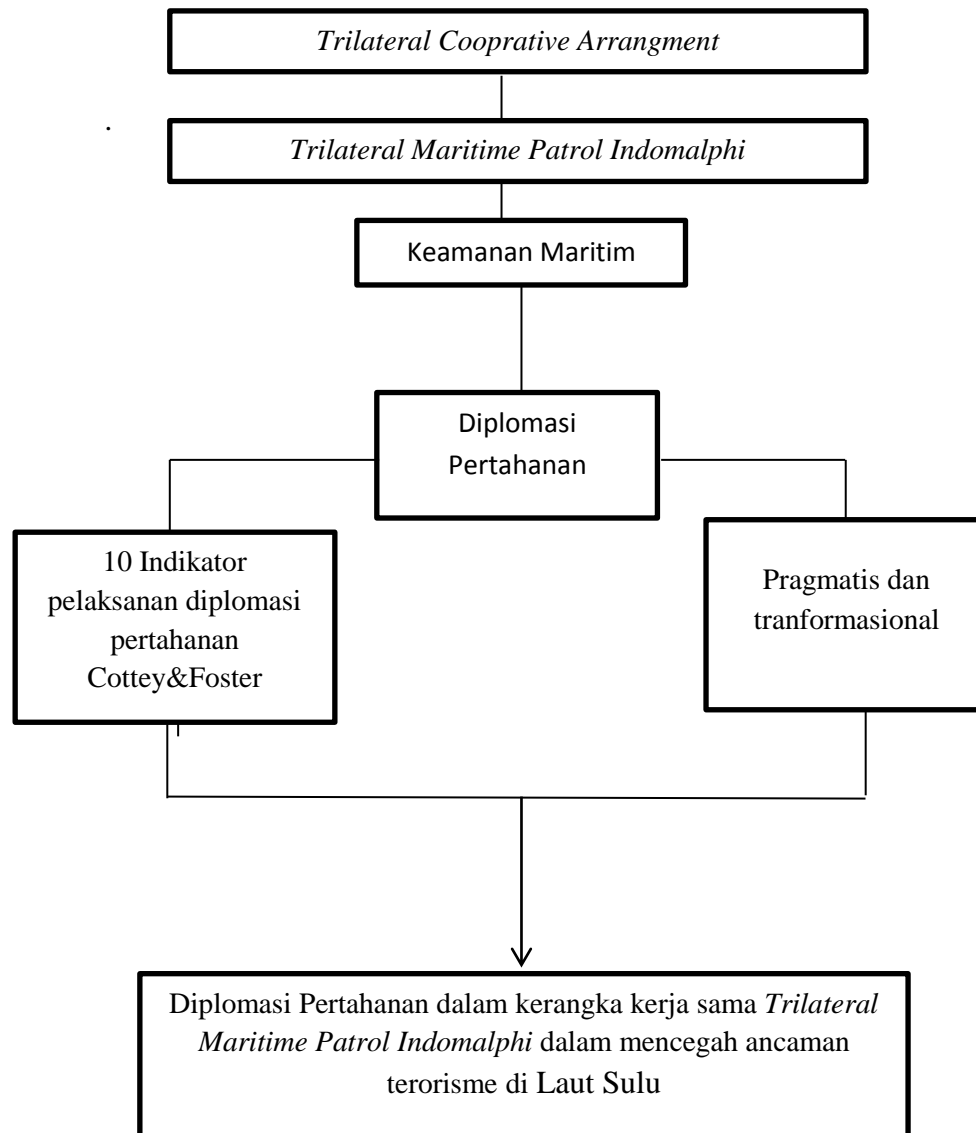
Dalam hal ini penulis menyimpulkan kalau konsep keamanan maritim, adalah suatu isu krusial yang saat ini sedang dihadapi semua negara, dimana

permasalahan perbatasan negara merupakan wilayah yang penting untuk terjamin keamanannya karena perbatasan adalah gerbang pintu utama akses masuk ke suatu negara, apabila keamanannya lengah tentunya akan menyebabkan permasalahan yang serius.

Oleh karena itu keamanan maritim dapat masuk kedalam agenda pertahanan nasional untuk menjaga kestabilan dan keamanan di kawasan perbatasan dan perairan dari berbagai ancaman sengketa antar negara seperti terorisme, pembajakan, perdagangan ilegal dan contoh kejahatan yang lain-lain yang terjadi di kawasan perairan. Dengan demikian konsep ini digunakan untuk menjelaskan permasalahan keamanan maritim yang sedang dihadapi oleh ketiga negara yaitu terorisme dalam kerja sama TMPI di Laut Sulu.

2.3 Kerangka Pemikiran

Indonesia telah bergabung dengan AMF yang fokus pada isu atau ancaman kemaritiman di kawasan Asia Tenggara, yang dimana forum ini juga beranggotakan Malaysia dan juga Filipina di dalamnya. Walaupun Indonesia, Malaysia dan Filipina sudah tergabung dalam AMF akan tetapi ketiga negara membuat kerja sama trilateral pada sektor maritim melalui pembentukan *Trilateral Arrangement Cooperation Indomalphi* (TCA) yang memiliki salah satu kerangka kerja yaitu TMPI yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ancaman terorisme di Laut Sulu-Sulawesi. Oleh karena itu sebagai suatu panduan untuk menjawab pertanyaan penelitian, berikut kerangka penelitian ini, seperti terlihat pada gambar 1.1



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan hipotesis, paradigma, atau kemungkinan menggunakan sudut pandang teoritis, dan kemudian mempelajari pertanyaan penelitian tentang makna suatu individu ataupun kelompok yang terkait dengan permasalahan sosial dan kemanusiaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Mulailah dengan hipotesis, paradigma, atau kemungkinan menggunakan perspektif teoretis, dan studi tentang pertanyaan penelitian yang meneliti makna suatu individu ataupun kelompok yang berhubungan dengan permasalahan sosial dan kemanusiaan. Peneliti juga menggunakan penelitian kualitatif untuk menganalisis data yang dikumpulkan secara lebih mendalam saat melakukan penelitian. Penulis menggunakan alur deduktif dalam pembentukan alur logisnya, karena pada dasarnya ia diekstraksi dari berbagai hal umum dan menunjuk ke arah tertentu.

Dalam hal ini peneliti memakai alur logika secara deduktif yang bersamaan dengan konsep diplomasi pertahanan, konsep keamanan maritim, dan kerja sama internasional dimana ketiganya saling berkaitan dalam hubungan diplomasi yang dipengaruhi berbagai hal yang bersifat luas dan juga umum mengenai kerja sama tentang bagaimana mencapai suatu kepentingan.

Data yang diperoleh untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif ialah berkaitan dengan kerangka kerja sama TMPI dan kepentingan yang ingin dicapai Indonesia. Dalam hal ini kerja sama kemaritiman antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam suatu kerja sama yang bernama TMPI, yang berbentuk data dari dokumen atau publikasi dan data lainnya sehingga dapat menggambarkan kenyataan dengan situasi berdasarkan konsep dan teori yang digunakan, konsep keamanan maritim, kerja sama internasional, dan juga diplomasi pertahanan yang telah dipilih. Penelitian kualitatif mengacu pada logika berpikir yang terus menerus dibangun seiring dengan kemajuan penelitian dan mengikuti proses penelitian.

3.2 Tingkat Analisis

Menurut Mochtar Mas'ood lewat bukunya *"Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi"*, di dalam Ilmu Hubungan Internasional terdapat level atau tingkat analisa, ia menetapkan level atau tingkat analisa tersebut menjadi "unit analisis atau analisa" yaitu unit yang perilakunya akan kita deskripsikan (hal ini biasa disebut juga "variable dependen") dan "unit eksplanasi" yaitu unit yang muncul oleh adanya dampak terhadap unit analisa yang sedang di amati (Mas'ood, 1990). Sehingga dalam penelitian ini penulis membuat tingkat analisis sebagai berikut.

Level/Tingkat Analisis: Interstate (Antar-Negara)	
Unit Analisis	Unit Eksplanasi
Diplomasi pertahanan dalam Implementasi <i>Trilateral Maritime Patrol Indomalphi</i> dalam menanggulangi ancaman terorisme di Laut Sulu dari selama periode 2016-2020	Ancaman terorisme di Laut Sulu dari 2016-2020

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus dalam menjelaskan diplomasi pertahanan dalam implementasi kerja sama *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* guna menanggulangi ancaman terorisme di Laut Sulu, pemilihan ini berlandaskan permasalahan yang sedang di hadapi oleh ketiga negara khususnya Indonesia karena fokus kerja sama ini terjadi di perairan Laut Sulu-Sulawesi sehingga akan dilihat dan dianalisis melalui konsep diplomasi pertahanan, kerja sama Internasional dan keamanan maritim sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana diplomasi pertahanan dalam implementasi kerja sama *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi*?

Pada penelitian ini peneliti memilih rentang waktu atau periode sejak awal pembentukan kerangka kerja sama ini yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020, dikarenakan menjadi awal dilakukannya pembentukan kerja sama ini dalam wadah TCA dan juga pemilihan hingga tahun 2020 karena menjadi awal kegiatan TMPI yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan koordinasi kerja sama dalam menghadapi ancaman terorisme kawasan perbatasan ketiga negara yang dimana terorisme menjadi musuh dan ancaman bersama.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Kumpulan sumber dan data yang akan peneliti peroleh merupakan data sekunder dan primer, dimana data sekunder itu sendiri merupakan berbagai data yang sudah dipublikasi dan dikeluarkan sebelumnya diperoleh dari pihak kedua. Penghimpunan data diperoleh dari pengumpulan pustaka, berbagai laporan resmi atau serangkaian publikasi, dalam hal ini informasi diperoleh dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (instansi resmi pemerintah yang berperan dalam kerjasama ini) untuk memperkaya penelitian.

Data untuk mewujudkannya. Peneliti juga mengumpulkan data terkait kerjasama TMPI dengan cara melakukan wawancara melalui media daring dengan atase pertahanan untuk memperkuat argumen dan mendapatkan data dan data lainnya, berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya atau website resmi www.kemhan.go.id, dokumen tersedia di www.jakartape.dfa.gov.ph, informasi ini beragam. dan lebih meyakinkan. <http://www.philembjkt.com>, melibatkan tujuan utama penelitian, dan juga pencarian data di Internet, seperti situs resmi www.Kemlu.go.id, serta ulasan dan jurnal di www.internationalaffairshouse.org, serta buku putih pertahanan Indonesia, dengan menggandeng Malaysia dan Filipina untuk meningkatkan keamanan maritim, jenis data yang dipergunakan dalam studi ini sejalan pada bagaimana diplomasi pertahanan dalam kerja sama maritim di antara ketiga negara yang mempunyai tujuan yang sama untuk menanggulangi permasalahan terorisme di kawasan Laut Sulu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan yaitu kajian pustaka yang diperoleh dari pihak Dirjen Strahan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai perwakilan yang terlibat dalam kerja sama *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi*. Kajian pustaka juga dilakukan dengan mengumpulkan data terkait kerja sama *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* di Laut Sulu-Sulawesi, data rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan oleh ketiga negara selama berlangsungnya kerja sama ini pada periode 2016-2020. Dokumen penelitian, buku atau jurnal yang berisi sumber data, hasil penelitian dan hal-hal lainnya, seperti dari berbagai website resmi seperti Kemlu.go.id, Kemhan.go.id, Tni.mil.id, philembjkt.com www.jakartape.dfa.gov.ph.

3.6 Teknik Analisis Data

Penggunaan metode studi pustaka yang diterapkan untuk menganalisis data penelitian akan digunakan teknik analisis data Milles dan Huberman, Analisis sekunder data kualitatif merupakan penggunaan data yang sudah ada untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang berbeda dari pertanyaan yang diajukan dalam penelitian asli (Bakry, 2016). Penggunaan analisis sekunder membuka peluang untuk memperoleh data tambahan atau mengejar temuan yang muncul dari analisis awal, Lisa Harrison dan Theresa Callan menyatakan bahwa analisis sekunder bukan hanya sekedar mengutip penelitian yang sudah ada akan tetapi juga menyiaratkan analisis kembali pada data yang didapat (Bakry, 2016).

Proses analisis data yang penulis gunakan ialah proses dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu : (Miles, Huberman, & Saldana, 2014)

- Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu terhadap proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data yang muncul dalam himpunan catatan lapangan tertulis, transkrip atau dokumen dan materi empiris lainnya. Dan dengan data yang penuh maka akan membuat data tersebut menjadi lebih kuat. Data kualitatif dapat diubah dengan cara seleksi, parafrase dan dimasukkan kedalam pola yang lebih besar.

- Penyajian data

Penyajian data untuk memudahkan melihat secara keseluruhan dan berbagai bagian tertentu dalam penelitian sehingga mempermudah dalam pengambilan langkah selanjutnya.

- Penarikan kesimpulan

Menarik kesimpulan menjadi akhir dari menganalisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Tahap ini akan menyederhanakan dan menyajikan, kemudian menarik kesimpulan, dan terakhir menjawab pernyataan pertanyaan penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Bab ini akan menjelaskan “gambaran umum negara di Asia Tenggara”, “gambaran umum keamanan di Laut Sulu-Sulawesi” dan “Program kerja sama *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* (TMPI). Sekilas pembahasan tentang negara di Asia Tenggara menjelaskan tentang profil secara singkat kesebelas negara dalam luas wilayah, jumlah penduduk dan juga anggaran pertahanan. Selain itu, pada sub bab tentang gambaran umum keamanan di Laut Sulu-Sulawesi dijelaskan mengenai kondisi keamanan di sekitaran perairan Sulu dan juga permasalahan terorisme dan juga kejahatan lainya yang ada di sana. Sub bab terakhir, mengenai program kerja sama *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* (TMPI), memaparkan rencana kerjasama Indomalphi, faktor-faktor pendukung kerjasama dan proses pembentukannya.

4.1 Gambaran Umum Negara-Negara kawasan Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara terdiri dari 11 negara yang letak geografis nya sangat startegis dalam perdagangan dunia khususnya dalam jalur laut terlebih lagi beberapa negara anggota nya memiliki peranan penting dalam jalur perdagangan oleh karena itu penulis akan menggambarkan secara singkat dalam bentuk table informasi mengenai profil 11 negara di kawasan Asia Tenggara:

4.1 Table Profil 11 negara Asia Tenggara

NO.	Negara	Luas Wilayah	Luas Wilayah Laut	Jumlah Penduduk	Anggaran Pertahanan
1.	Indonesia	1.904.569 km ²	3.247.357 km ²	261,1 Juta Jiwa	\$ 9,200,000,000
2.	Vietnam	331.230,8 km ²	21.140 km ²	92,7 Juta Jiwa	\$ 6,390,000,000
3.	Timor Leste	15.007 km ²	610.000 km ²	1,293 Juta Jiwa	\$ 26,000,000
4.	Kamboja	181.035 km ²	4.520 km ²	15.76 Juta Jiwa	\$ 600,000,000
5.	Filipina	343.448 km ²	1.830 km ²	103.3 Juta Jiwa	\$ 4,250,000,000
6.	Thailand	513.120 km ²	205.600 km ²	68.86 Juta Jiwa	\$ 7,200,000,000
7.	Brunei Darussalam	5.765 km ²	495,79 km ²	423.196 Ribu Jiwa	\$ 492,750.000
8.	Myanmar	676.578 km ²	678.500 km ²	52.89 Juta Jiwa	\$ 2,000,000,000
9.	Singapura	721.5 km ²	193 km	5.61 Juta Jiwa	\$ 10,700,000,000
10.	Malaysia	329.847 km ²	4,675 km	31.19 Juta Jiwa	\$ 3,850,000,000
11.	Laos	237.955 km ²	0 km	6.76 Juta Jiwa	\$ 18,000,000

Sumber: <http://setnas-asean.id/profil-negara-anggota-asean>, <https://www.globalfirepower.com/coastline-coverage.php>

Pada table diatas Indonesia menjadi negara yang memiliki luas wilayah daratan terluas dengan 1.904.569 km², sedangkan Singapura menjadi negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki wilayah darat tersempit yaitu hanya seluas 721.5 km². Pada luas wilayah laut Indonesia kembali mendominasi luas wilayah laut nya seluas 3.247.357 km², sedangkan negara Laos menjadi negara yang tidak memiliki wilayah lautan atau perairan.

Pada bagian jumlah penduduk Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dengan 261,1 Juta Jiwa dan menjadi negara dengan padat penduduk, sedangkan negara Brunei Darussalam menjadi negara yang memiliki jumlah penduduk terendah dengan hanya 423.196 Ribu Jiwa saja di wilayah seluas 5.765 km². Pada kolom terakhir yaitu jumlah anggaran keamanan Singapura menjadi negara dengan anggaran pertahanan tertinggi dengan \$ 10,700,000,000, dan Laos menjadi negara dengan anggaran militer terendah yaitu hanya \$ 18,000,000.

Pada table tersebut Indonesia, Malaysia dan Filipina sama-sama mempunyai wilayah laut akan tetapi luas wilayah laut Indonesia menjadi yang paling luas diantara kedua negara lainnya, meski luas wilayah laut kedua negara sangat kecil wilayah laut mereka menjadi sangat penting dalam jalur perdagangan dunia dan keberadaan wilayah laut nya berdekatan dengan perbatasan Indonesia, akan tetapi walaupun terdapat perbedaan yang besar dalam luas wilayah, jumlah penduduk ataupun anggarang militer dalam hal ini ketiga negara mempunyai permasalahan bersama yaitu lemahnya perbatasan ketiga negara tepatnya pada wilayah Laut Sulu, yang dikenal dengan wilayah *Terrorist Tri Angel*, tempat teroris Abu Sayyaf melakukan aktifitas terorisme seperti pembajakan dan perompakan terhadap nelayan ketiga negara.

Oleh karena itulah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam kerja sama TMPI dalam menanggulangi permasalahan terorisme yang ada di Laut Sulu, dimana ketiga negara mempunyai kepentingan bersama dalam membrantas kejahatan

yang terjadi di wilayah laut Sulu khususnya pada kasus terorisme yang sedang dihadapi oleh ketiga negara.

4.2 Gambaran Umum Keamanan Maritim Di Laut Sulu

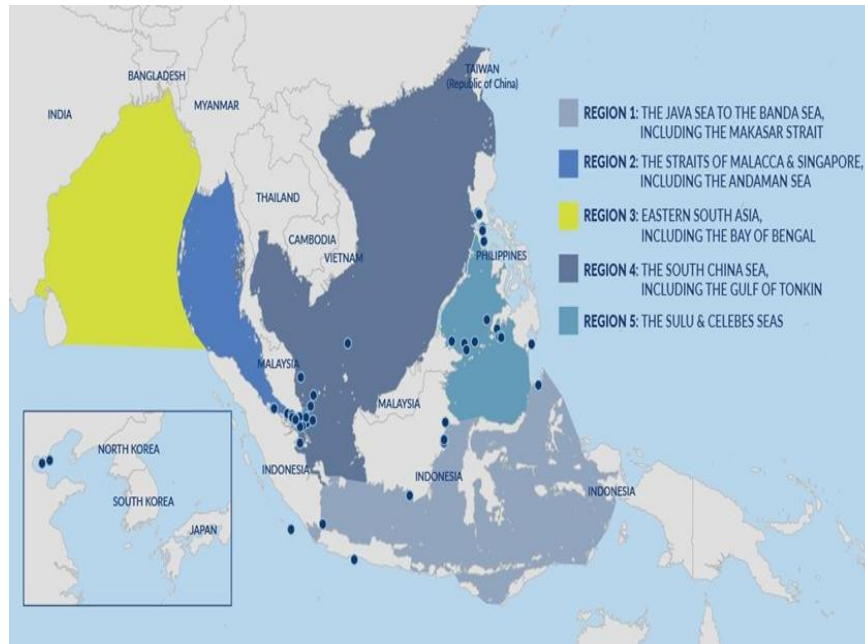
Wilayah ketiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Filipina terdapat daerah perbatasan yang meliputi beberapa jalur perdagangan melalui laut yang sangat penting bagi ketiga negara tersebut, dan daerah perbatasan ketiga negara tersebut juga dekat dengan kekayaan ekologi Laut Sulu Sulawesi. Laut Sulu dan Laut Sulawesi adalah perairan besar di Asia Tenggara bagian timur. Di barat laut Laut Sulu adalah Pulau Palawan di Filipina, di tenggara adalah Kepulauan Sulu, terdiri dari Kepulauan Basilan, Choro dan Tavi-Tavi, dan di barat daya adalah negara bagian Sabah di Malaysia timur. Laut Sulawesi terhubung dengan Pulau Sulu dan Mindanao di utara, Sabah dan Pulau Kalimantan di barat, dan Sulawesi di selatan (Liputan6, 2016).

Wilayah laut Sulu-Sulawesi merupakan jalur laut yang padat, karena dari jalur Laut Sulu di Filipina Selatan hingga wilayah perairan Sabah di Malaysia Timur, perairan ini dilewati 13.000 kapal setiap tahunnya. Namun menurut data *International Maritime Bureau* (IMB), Laut Sulu merupakan salah satu perairan paling menakutkan dan berbahaya di dunia. Menurut *International Maritime Commission* (ICC) dan *International Maritime Bureau* (IMB), perompakan di perairan teritorial ASEAN. Menyumbang lebih dari setengah dari jumlah bajak laut, semua bajak laut dan perampokan bersenjata di lautan dunia. Dibandingkan dengan Afrika dan Asia Timur, faktor ini telah meningkatkan tingkat pembajakan dan perampokan di kawasan ASEAN. Data tersebut hanya mencakup tahun 2015.

Sementara itu, menurut versi ICC dan IMB, sejak tahun 2006 jumlah kasus kapal bajak laut di Asia Tenggara terus meningkat setiap tahun karena banyaknya insiden pembajakan dan penculikan di kawasan Laut Sulu (Espanilla, *Abductions at Sea: A 3-Way Security Challenge for Indonesia, Malaysia, and the Philippines*, 2016). Salah satunya dilakukan oleh organisasi teroris Abu Sayyaf Group (ASG), yang telah beroperasi sejak 2001. Sebelum tahun 2001, Kelompok Abu Sayyaf telah melakukan banyak kejahatan, seperti penculikan untuk mendapatkan uang tebusan dan perampokan di perairan timur Sabah dan wilayah laut Sulu (Maritimenews, 2017).

Sejak Maret 2016, telah dilaporkan bahwa penculikan untuk berbagai tujuan telah terjadi di Timur Sabah dan wilayah Laut Sulu. Meski beberapa insiden pembajakan tampaknya dilakukan oleh kelompok kriminal biasa, serangan di sana biasanya terkait dengan kelompok bersenjata Abu Sayyaf yang beroperasi di Filipina Selatan (Anugrah, 2018).

Popularitas Laut Sulu mungkin tidak tinggi, karena lokasinya "tersembunyi" oleh perairan internasional. Terletak di antara Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Laut Sulawesi, juga terlindung di balik pulau-pulau Selatan Filipina, termasuk Palawan dan Mindanao, serta pulau-pulau kecil lainnya di dekat Sabah, Kalimantan. Namun karena aktivitas kelompok pembajak sulit dideteksi oleh aparat, daerah terpencil justru memberikan keuntungan bagi kelompok pembajak. Tak heran, organisasi militan seperti Abu Sayyaf berani melakukan tindakan, seperti penahanan, perampokan dan penculikan nelayan dan tukang perahu yang melaut di sini (Anugrah, 2018).



Gambar 4.1 Insiden Pembajakan di Asia Tenggara (*Oceans Beyond Piracy, 2017*)

Di perairan yang dibagi dengan Indonesia dan Malaysia di pulau Kalimantan, permukaan bumi yang kasar dan tidak rata di pulau itu memungkinkan teroris, seperti Gemma Islamabad, untuk melatih, mempertahankan, dan berkembang sepenuhnya dengan bebas. Daerah Otonomi Mindanao di Laut Sulu adalah rumah bagi kelompok militan lainnya termasuk Abu Sayyaf dan Front Pembebasan Islam Moro. Dengan memanfaatkan batas-batas kawasan yang keropos, kelompok-kelompok ini dapat melatih, mempertahankan, dan bergerak bebas di seluruh kawasan. Masalah Sulu semakin pelik karena penculikan selalu terjadi di luar wilayah kerja TNI dan Bakamla (Isa & Shafiq, 2017).



Gambar 4.2 peta wilayah Laut Sulu

Kelompok Abu Sayyaf serta kelompok bajak laut bersenjata di Filipina selatan bertujuan untuk menciptakan negara baru yang terdiri dari orang-orang Moro, yaitu Filipina bagian selatan yang meliputi beberapa wilayah. Wilayah ini termasuk Palawan, Mindanao, Basilan dan perairan teritorial Laut Sulu, tempat teroris menyebarkan aktivitas teroris ke negara tetangga Malaysia dengan melancarkan serangan di sebuah resor di Malaysia dan menculik hingga 21 orang. Teroris yang menculik banyak warga. Negara Indonesia berada di kapal di perairan Sulu Sulawesi, bertujuan untuk meminta uang tebusan (Isa & Shafiq, 2017).

4.3 Program kerja sama *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi (TMPI)*

Dalam upaya menanggulangi permasalahan terorisme dan keamanan di Laut Sulu, Indonesia membentuk suatu program kerja sama trilateral yang berfokus di bidang maritim bersama Malaysia dan Filipina, dalam hal ini diawali pada tahun 2016 ketika pertemuan di kota Yogyakarta dimana pertemuan ini di

hadiri perwakilan dari tiga negara hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu Menlu RI dan Menlu Malaysia Retno LP Marsudi, serta Menlu Datuk Seri Hanifa Oman, Filipina Jose Lei Ne D. Alamandez, Panglima Jenderal TNI Gato Nurmyanto, Jenderal Angkatan Darat Malaysia Datuk Seri Zukielfi Bin Mohd dan Angkatan Darat Filipina Wadham Kaiser Ta (*Card Agence France-Presse*) (Satari, 2017). pertemuan ini menjadi cikal bakal *Trilateral Arrangement Cooperation Indomalphi* (TCA) yang memiliki salah satu kerangka kerja yaitu *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* (TMPI)

Program *patroli maritim trilateral Indomalphi* merupakan tindak lanjut kerja sama ketiga negara melalui *joint statement* dan *joint statement*. Karena tingkat kejahatan yang tinggi di kawasan tersebut, pembentukan rencana tersebut menjadi penting ketika Filipina diserang kelompok ISIS, kelompok Abu Sayyaf (ASG) dan wilayah afiliasi penjahat bajak laut lainnya yang mempengaruhi kawasan ASEAN (The Diplomat, 2018). Kegiatan kerja sama TMPI ini direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk mengatasi tantangan keamanan terkait perairan perbatasan yang saat ini menjadi fokus perhatian di kawasan Laut Sulu-Sulawesi (Satari, 2017).

Berdasarkan semua yang telah dijelaskan mengenai gambaran umum ancaman terorisme di wilayah Laut Sulu dan juga permasalahan keamanan perbatasan khususnya terorisme yang menjadikan wilayah Indonesia, Malaysia dan Filipina sebagai jalur perpindahan dan juga perompakan, yang disebabkan oleh lemahnya pertahanan dan juga berbagai faktor lain yang membuat harus adanya tindakan langsung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ketiga

negara melakukan pembentukan kerja sama di bidang kemaritiman dalam suatu forum kerja sama *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* (TMPI), yang diharapkan dapat menanggulangi permasalahan yang ada, oleh karena itu permasalahan perbatasan dan terorisme menjadi dasar acuan bagaimana ketiga negara bersepakat membentuk kerja sama TMPI ini, dan pada bab selanjutnya akan berfokus melihat bagaimana kondisi ancaman terorisme keamanan maritim yang saat ini terjadi di wilayah perbatasan ketiga negara yaitu di wilayah Laut Sulu, implementasi program kerja sama TMPI dan menjabarkan diplomasi pertahanan Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam kerja sama TMPI.

Program kerja dari kerja sama TMPI yang bukan hanya sekedar kegiatan patroli gabungan saja akan tetapi ada ketiga program kerja yang saling berkaitan satu sama lain yaitu :

- ***Port Visit Trilateral Maritime Patrol Indomalphi***

Setelah menyepakati kerja sama TMPI ketiga negara langsung bersiap diri untuk melakukan persiapan yang lain salah satunya dengan *port visit* atau melaksanakan kunjungan ke pelabuhan tiap negara yang berbatasan langsung dengan Laut Sulu, dimana kunjungan ini juga diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerja sama, meningkatkan kerja sama timbal balik dan interoperabilitas ketiga negara melalui pengembangan aturan keterlibatan maritim gabungan dalam bentuk latihan ataupun dalam bentuk kerja sama di lapangan dan menyusun berbagai cara untuk menghadapi ancaman di Laut Sulu dimana kegiatan ini akan rutin dilaksanakan setiap tahunya salah satunya di adakan di Tarakan (GOVPH, 2019).



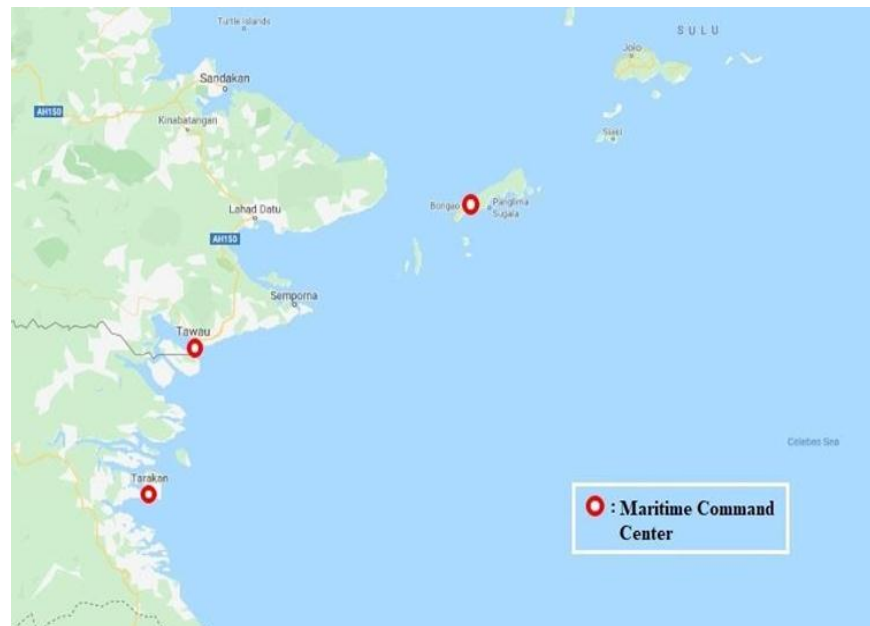
Gambar 5.1 Port Visit di Tarakan Kalimantan Utara

Kegiatan ini dihadiri oleh Atase Pertahanan dan Angkatan Bersenjata setiap negara, dan menjadi kegiatan gabungan reguler yang diselenggarakan secara bergantian oleh ketiga negara dibawah kerja sama Trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina (INDOMALPHI), kegiatan ini dilaksanakan di Pulau Tarakan dimana Pulau Tarakan sendiri adalah lokasi yang sangat strategis yang penting bagi Indonesia karena merupakan daerah jalur cepat selama perang Pasifik, dan berfungsi sebagai kota transit yang terkenal dalam perdagangan Indonesia dan Malaysia (GOVPH, 2019).

- ***Maritime Command Center***

Pada 19 Juni 2017 selain menjadi acara pengesahan dimulainya kerja sama Indomalphi, pada saat itu juga tanda dimulainya pertukaran informasi mulai diterapkan dan menjadi acara berdirinya tiga pos komando atau *Maritime Command Center* (MCC), untuk setiap negara dimana pos komando yang pertama berada di Tarakan,

Indonesia; yang kedua berada di Tawau, Malaysia; dan yang terakhir di Bongao, Filipina (McKirdy, Quiano, & Watson, 2017).



Gambar 5.2 Letak Pusat Komando Maritim

MCC berfungsi untuk memantau atau memonitoring seluruh perairan di wilayahnya dan selanjutnya akan berkomunikasi secara intens sehingga saat terjadi perompakan, dan tindak kriminal lainnya oleh kelompok terorisme maka, masing-masing MCC akan menggerakkan unsur patroli laut terdekat untuk menanggulangi, saat perompak ataupun teroris mencoba melarikan diri kewilayah negara lainnya, maka disana telah siaga unsur patroli laut negara dengan kontrol dan informasi dari MCC sehingga negara tersebut selalu terhubung dengan MCC (Kementrian Pertahanan, 2017).

- ***Sea Lane Corridor***

Koridor jalur laut dibentuk untuk membuat jalur transportasi di perairan Sulu-Sulawesi yang merupakan jalur transportasi aman yang dapat dilalui oleh kapal dagang. Rute ini membentang di sepanjang

Laut Sulawesi hingga ke perairan Filipina bagian selatan. Koridor Jalur Laut adalah jalur patroli yang ditetapkan dalam rencana Patroli Maritim Trilateral Indomalphi, khusus untuk kapal dagang yang melewati jalur Sulu-Sulawesi. Saat menentukan jalur koridor lintas laut, tim patroli maritim trilateral mempertimbangkan aspek-aspek tertentu seperti jarak dan keamanan Laut Sulu-Sulawesi (Liputan6, 2016).

Untuk memastikan sempitnya alur laut, dalam pembentukan koridor lintas laut ditempatkan pada kawasan rawan perompakan di perbatasan tiga negara. Kejahatan perompakan rawan terjadi di perairan selatan Filipina yang merupakan contoh pertama penerapan alur laut yang terdapat di selatan Filipina yaitu Teluk Morro dan Selat Basilan (Liputan6, 2016).

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Bab ini akan menjelaskan hasil dari analisis pada pembahasan sebelumnya yaitu analisis diplomasi pertahanan dalam *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* guna menanggulangi ancaman terorisme di Laut Sulu pada periode 2016 hingga 2020, yang sebelumnya telah dianalisis menggunakan konsep diplomasi pertahanan. Ancaman keamanan yang terjadi di kawasan Laut Sulu yang disebabkan oleh lemahnya keamanan di wilayah perbatasan Laut Sulu telah menyebabkan berbagai permasalahan mulai dari perdagangan ilegal, hingga perompakan yang dilakukan oleh para kelompok teroris Abu Sayyaf serta menjadi jalur perpindahan teroris ke tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang tentunya sangat mengancam keamanan ketiga negara. Terorisme sudah menjadi salah satu ancaman non-konvensional saat ini dan menjadi pusat utama pemerintah dari banyak negara terlebih lagi kawasan ketiga negara merupakan titik panas dari aktifitas terorisme di kawasan Asia Tenggara.

Oleh karena itulah Indonesia menginisiasi pembentukan kerja sama TMPI bersama dengan Malaysia dan Filipina sebagai upaya agar dapat mengatasi permasalahan yang ada dengan berbagai program kerja, dalam penelitian ini lebih di fokuskan pada kegiatan patroli bersama, kunjungan dan latihan bersama yang dilakukan oleh ketiga negara, kegiatan tersebut juga sudah berdampak terhadap

aktivitas terorisme yang terjadi di kawasan Laut Sulu. Melalui bentuk pertahanan pragmatis pada kerja sama Indomalphi ini telah membuat adanya rasa kepercayaan satu sama lain diantara ketiga negara untuk memberikan informasi secara langsung kepada setiap negara apabila terjadi suatu aktivitas yang mencurigakan ataupun membahayakan ketiga negara dalam *Maritime Command Center* (MCC), menurut penulis dengan adanya MCC ini akan mempercepat pemberian informasi kepada para patroli laut terdekat diantara ketiga negara untuk mengatasi ancaman yang ada sebelum perompak atau teroris ini melarikan diri ke bagian negara lainnya dan faktor lain yang mempengaruhi menurunnya angka kasus pembajakan dan penculikan yang terjadi dikarenakan keberhasilan pemerintah dan pasukan militer Filipina dalam melakukan operasi penyerangan terhadap kelompok Abu Sayyaf.

Kerja sama TMPI ini juga menjadi strategi pertahanan yang dilakukan Indonesia, terdapat aspek diplomasi pertahanan dalam kerja sama ini hal ini terlihat dari bagaimana ketiga negara menempatkan militer dalam diplomasi bukan untuk kepentingan yang bersifat koersif terhadap satu sama lain hal ini terjadi karena ketiga negara sedang dihadapkan oleh ancaman yang sama yang ketiga nya juga memiliki kepentingan yang sama yaitu memberantas terorisme dikawasan tersebut, meskipun sebelumnya ketiga negara memiliki perbedaan pandangan politik dan pernah berkonflik yang seharusnya kerja sama seperti ini cukup sulit terjadi, dan kerja sama ini dari 10 poin aktivitas diplomasi pertahanan yang ada telah mencakup 70% dari poin yang ada dan sangat menekan pada bagian poin ke-1; ke-3; ke-6 ke-8; dan juga ke 10 hal ini dikarenakan konteks dari

kelima poin tersebut adalah menjaga kekrabatan dan juga keamanan kawasan yang menjadi tujuan utama dalam kerja sama ini.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis implementasi *Trilateral Maritime Patrol Indomalphi* dalam menanggulangi ancaman terorisme di Laut Sulu, maka saran yang dapat penulis berikan ialah :

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendalami serta mengupas konsistensi kerja sama TMPI ini sudah sejauh apa permasalahan terorisme yang terjadi di kawasan Laut Sulu di atasi, karena permasalahan ini tentunya bukan hanya mempengaruhi dari sektor keamanan saja akan tetapi juga mempengaruhi sektor ekonomi ketiga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya. (1991). The Association of Southeast Asian Nations: "Security Community" or "Defence Community. *Pacific Affairs*, 159-651.
- Andi, K. T. (2021, Agustus 04). Interview Defence Attche Indonesia in Malaysia. (B. R. Xanditama, Pewawancara)
- Anugrah, T. (2018, Agustus 19). *Geopolitik dalam konteks Keamanan Maritim*. Dipetik Maret 18, 2021, dari Researchgate: https://www.researchgate.net/publication/332343680_Laut_Sulu
- Apriyana, M. A. (2019). Kerja sama Trilateral dalam Menangani Ancaman Maritim di Perairan Sulu . *E Jurnal Hubungan Internasional Vol 7*, 1405.
- Ardiansyah, R. (2020). Kerja sama Trilateral (Indonesia-Malaysia-Filipina) Melalui Program Trilateral Maritime Patrol INDOMALPHI untuk Meningkatkan Keamanan Maritim di Laut Sulu-Sulawesi Periode 2016-2019. *Universitas Komputer Indonesia*, 1.
- Ariani. (2018). The Implementation of Trilateral Cooperation Arrangement between Indonesia, Malaysia, and the Philippines: Increasing of Maritime Security Cooperation to Reduce Maritime Piracy at Sulu Sea. Dalam Ariani, *The Implementation of Trilateral Cooperation Arrangement between Indonesia, Malaysia, and the Philippines: Increasing of Maritime Security Cooperation to Reduce Maritime Piracy at Sulu Sea*. Cikarang: President University.
- Armandhanu. (2016, march 29). *Kronologi penculikan 10 ABK Indonesia oleh Abu Sayyaf*. Dipetik April 20, 2021, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/news/internasional/20160329133044-106-120240/kronologi-penculikan-10-abk-indonesia-oleh-abu-sayyaf>
- Arshad. (2016). *Jakarta, KL and Manila to start patrol in Sulu Sea* . Dipetik maret 24, 2021, dari Straits Times : <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/jakarta-kl-and-manila-to-start-joint-patrols-in-sulu-sea>
- Astriana , F., Arif, M., Fadhila, A., Hanifa, H., & Wenstama, V. (2018). Joint Maritime Cooperation in The South China Sea: Lesson from The Indonesia-Malaysia-Philippines Trilateral Maritime Patrol (INDOMALPHI). *Asean Briefs*, 1.

- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Balzacq, T., Charillon, F., & Ramel, F. (2020). *Global Diplomacy: An Introduction to Theory and Practice*. Paris: Palgrave Macmillan.
- Bappenas. (2013, October 23). *Peningkatan Kemampuan Negara*. Dipetik July 7, 2021, dari Bappenas: <https://www.bappenas.go.id/files/4913/5078/6556/bab-7-20090202204616-1756-8.pdf>
- Blagalojevic, & Subotic. (2018). Defence Diplomacy in Strategic Context of Asymmetric Threat to National Security. *Asymmetry and Strategy*, 644.
- BPPK Kemlu. (2016). Diplomasi Poros Maritim : Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri. Dalam B. Kemlu, *Diplomasi Poros Maritim : Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri* (hal. 2). Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Buerger, C. (2015). What is Maritime Security ? *Marine Policy*, 159-164.
- Chairil, & Siregar, c. n. (2020). Ancaman Keamanan Nasional di Wilayah Perbatasan Indonesia Studi Kasus Pulau Sebatik dan Tawau (Indonesia-Malaysia). *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 27.
- Chochrane. (2016, Mei 6). *Indonesia, Malaysia and Philippines to Bolster Security at Sea*. Dipetik Maret 23, 2021, dari New York Times: <https://www.nytimes.com/2016/05/06/world/asia/indonesia-malaysia-philippines-naval-patrols.html>.
- Christianti. (2016, April 1). *4 Warga Malaysia Diculik Kelompok Abu Sayyaf di Perairan dekat Sabah*. Dipetik April 21, 2021, dari Detik News: <https://news.detik.com/internasional/3178197/4-warga-malaysia-diculik-kelompok-abu-sayyaf-di-perairan-dekat-sabah>
- Cottey, & Forster. (2004). *Reshaping Defence and Durable Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Oxon: Routledge.
- Dai, X., Snidal, D., & Sampson, M. (2010). *International Cooperation Theory and International Institutions*. Oxford Research Encyclopedia of International Studies.
- Departement of Foreign Affairs Philippines. (2019, March 11). *PH Embassy Participates in Trilateral Maritime Patrol and Port Visit to Tarakan Island*. Dipetik Juli 07, 2021, dari Departement of Foreign Affairs Philippines: <https://dfa.gov.ph/dfa-news/news-from-our-foreign-service-postupdate/20279-ph-embassy-participates-in-trilateral-maritime-patrol-and-port-visit-to-tarakan-island>
- Detik. (2010, April 22). *Indonesia-Malaysia Teken Kerja Sama Pengembangan Industri Pertahanan*. Dipetik Mei 30, 2021, dari Detik.com:

<https://news.detik.com/berita/d-1343792/indonesia-malaysia-teken-Kerjasama-pengembangan-industri-pertahanan>

- Drab, I. (2018). Defence Diplomacy An Important Tool For The Implementation of Foreign Policy and Security of The State. *Security and Defence Quarterly*, 60.
- Eastern Mindanao Command. (2019, November 25). *First Philippine Indonesia Maritime Training Kicks-off*. Dipetik July 7, 2021, dari Kalinawnews: <https://www.kalinawnews.com/first-philippine-indonesia-maritime-training-kicks-off/>
- Eastern Mindanao Command. (2019, November 25). *First Philippine Indonesia Maritime Training Kicks-Off*. Dipetik July 8, 2021, dari Kalinawnews: <https://www.kalinawnews.com/first-philippine-indonesia-maritime-training-kicks-off/>
- Espanilla, J. (2016, Mei 5). *Abductions at Sea: A 3-Way Security Challenge for Indonesia, Malaysia, and the Philippines*. Dipetik Maret 18, 2021, dari The Diplomat: <http://www.thediplomat.com/2016/05/abductions-at-sea-a-3-way-security-challenge-for-indonesia-malaysia-and-the-philippines>
- Espanilla, J. (2016, Mei 2). *Abductions at Sea: A 3-Way Security Challenge for Indonesia, Malaysia, and the Philippines: As Southeast Asian pirates turn to abductions, what can regional states do*. Dipetik Februari 3, 2021, dari The Diplomat: <https://r.search.yahoo.comhttpsfthediplomat.com%2f2016%2f05%2fabductions-at-sea-a-3-way-security-challenge-for-indonesia-malaysia-and-thephilippines>
- Firmansyah. (2019, July 8). *Antaranews*. Dipetik September 27, 2020, dari Menhub: Indonesia Memiliki Peran Penting dalam Kebijakan Kemaritiman: <https://www.antaranews.com/berita/947092/menhub-indonesia-memiliki-peran-penting-dalam-kebijakan-kemaritiman>
- Franco. (2019). Transnational Security in the Sulu Sea: Something New or Something Old? *Asia Center*, 1-5.
- Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces . (2007). *Defence Attachés. DCAF Backgrounder series*.
- Gill, & Max. (1997). *Arms, Transparency and Security in South East Asia*. New York: Oxford University Press.
- Gill, & Max. (1997). *Arms, Transparency and Security in South East Asia*. New York: Oxford University Press.
- Gindarsah. (2015). Indonesia Defence Diplomacy: Harnessing the Hedging Strategy Againsts Regional Uncertainteis. *RSIS Working Paper S Rajatanam School of International Studies*, 2.

- Global Fire Power. (2021, January). *Indonesia Military Strength*. Dipetik Maret 22, 2021, dari Global Fire Power: <https://www.globalfirepower.com/navy-ships.php>
- GOVPH. (2019, Febuari). *PH Embassy Participates in Trilateral Maritim Patrol and Port Visit to Tarakan Island*. Dipetik maret 21, 2021, dari Departement of Foreign Affairs Republic of Philipines: <https://dfa.gov.ph/dfa-news/news-from-our-foreign-service-postsupdate/20279-ph-embassy-participates-in-trilateral-maritime-patrol-and-port-visit-to-tarakan-island>
- Guerra. (2017). *Indonesia/Philippines/Malaysia: Aggrement on Patrolling Shared Maritime Border*. Dipetik Maret 24, 2021, dari The Philippines Goverment Library of Congress: <https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/indonesiaphilippinesmalaysia-agreement-on-patrolling-shared-maritime-border>
- Holsti, K. (1988). *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall.
- House of Commons. (1998). The Strategic Defense Review White Paper. Dalam H. o. Commons, *The Strategic Defense White Paper*. London: House of Commons.
- ICoCCCS. (2016, January 21). *Pirarcy Reporting Center*. Dipetik Februari 3, 2021, dari ICCoCCS: <https://www.icc-ccs.org/index.php/pirarcy-reporting-centre/live-pirarcy-report>.
- Ikbar, Y. (2014). *Metedologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Isa, & Shafiq, I. (2017, Agustus 21). *Laut Sulu Bukan Somalia Asia ?* Dipetik Maret 18, 2021, dari Utusan Malaysia: <http://www.utusan.com.my/berita/luar-negara/laut-sulu-bukan-8216-somalia-asia-8217-1.464936>.
- Joanita, U. (2019). Implementasi Trilateral Cooprative Arrangment (TCA) INDOMALPHI sebagai hasil diplomasi pertahanan Indonesia dalam menanggulangi ancaman keamanan Laut Sulu periode 2016-2018. *Universitas UPV Veteran* , VII.
- Johnshon, & Fernquest. (2018). *Governing Through Killing: The War on Drugs in the Philippines*. London: Cambridge University.
- Kementrian Koordinator Bidang Kematritiman. (2018). *Laporan Kinerja Kementrian Koordinator Bidang Kematritiman Tahun 2017*. Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Kematritiman.
- Kementrian Luar Negeri Indonesia. (2012, February 7). *International Treaty Indonesia Malaysia*. Dipetik July 08, 2021, dari Directoral General of Legal Affairs and International Treaties: <https://treaty.kemlu.go.id/search>
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (1984). *pengaturan dalam bidang keamanan di daerah-daerah perbatasan antara Pemerintah Republik Indonesia*

dan Pemerintah Malaysia. Yogyakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

- Kementerian Pertahanan. (2017, Juni 19). *Kementerian Pertahanan. Trilateral Maritime Patrol Indomalphi Resmi Dimulai*. Dipetik Februari 2, 2021, dari Kementerian Pertahanan: <https://www.kemhan.go.id/2017/06/19/trilateral-maritime-patrol-indomalphi-resmi-dimulai>.
- Kementerian Pertahanan Filipina. (2016). . *4th Trilateral Defense Ministerial Meeting among PH, Indonesia, and Malaysia*. Quenzon City: Kementerian Pertahanan Filipina.
- Kemhan. (2017, Juni 27). *Kementerian Pertahanan*. Dipetik Maret 14, 2021, dari Patroli Laut tiga Negara di mulai apa saja rencana Ryamizard Ryacudu: <https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/06/27/patroli-laut-tiga-negara-dimulai-apa-saja-rencana-ryamizardhtml>.
- Komando Armada II. (2019, februari 28). *Danlantamal XIII Tarakan Membuka Latihan Gabungan Trilateral Maritime Patrol Indomalphi 2019*. Dipetik 07 07, 2021, dari Koarmada2TNIAL: <http://koarmada2.tnial.mil.id/2019/02/25/danlantamal/xiii/tarakan/membuka/latihan/gabungan/trilateral/maritime/patrol/indomalphi/>
- Liputan6. (2016, Juni 16). *Ini Jalur Aman Pelayaran Laut Sulawesi-Filipina Selatan*. Dipetik Maret 13, 2021, dari Liputan6: <https://www.liputan6.com/news/read/2544890/ini-jalur-aman-pelayaranlaut-sulawesi-filipinaselatan>
- Mahmud, Z. K. (2020). Analisis Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Malaysia dan Filipina: Studi Kasus Ancaman Terorisme di Kawasan Laut Sulu. *Universitas pertamina*, 80.
- Malaysia Military Times. (2019, july 30). *Malaysia Host Sixth Trilateral Maritime Patrol Port Visit in Sandakan* . Dipetik 07 07, 2021, dari Malaysia: <https://mymilitarytimes.com/index.php/2019/07/30/malaysia-hosts-sixth-trilateral-maritime-patrol-port-visit-in-sandakan/>
- Maritimnews. (2017, Juni 5). *Upaya atasi prompak di perairan perbatasan Indonesia Filipina*. Dipetik Maret 13, 2021, dari Maritimnews: <http://maritimnews.com/2017/05/upaya-atasi-perompak-di-perairanperbatasan-indonesia-filipina-bagian>
- Mas'oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* . Jakarta: LP3ES.
- Masyarakat ASEAN. (2016). *Membangun Kiprah Maritim Indonesia di Kawasan*. Jakarta: Direktorat Jendral Kerja sama ASEAN Kementerian Luar Negeri.
- McKirdy, E., Quiano, K., & Watson, I. (2017, Juni 2019). *Indonesia, Malaysia, and Philippines Launch Joint Patrols to Tackle ISIS Threat*. Dipetik maret 22, 2021,

dari CNN: S threat. <https://edition.cnn.com/2017/06/19/asia/indonesia-malaysia-philippines-isis/index.html>.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Ministry of Defence . (2002). *The Strategic Defence Review: A New Chapter*. London: Ministry of Defence.
- My Military Times. (2019, October 9). *Malaysian Defence Attache In Indonesi: Bilateral Ties Very Active Intensive*. Dipetik 7 7, 2021, dari My Military Times: <https://mymilitarytimes.com/index.php/2019/10/09/malaysian-defence-attache-in-indonesia-bilateral-ties-very-active-intensive/>
- National University of Singapore Center for International Law. (2017). *Indonesia-Philippines Cooperation in Combating Maritimr Crimes: Lessons from the Malacca Straits Patrol and the Role of ASEAN*. Manila: Asian Law Institute.
- Naval Forces Western Mindanao. (2019, December 2). *7th Trilateral Port Visit and Maritime Traning Activities (INDOMALPHI)*. Dipetik july 06, 2021, dari Naval Forces Western Mindanao: Facebook: <https://www.facebook.com/hnfwm/videos/494577284599298/>
- Oceans Beyond Pirarcy . (2017). *Pirarcy and Armed Robbery Againts Ships in Asia 2017*. Dipetik maret 24, 2021, dari Oceans Beyond Pirarcy : <https://OceansBeyondPirarcy.org/report/sop/se-asia>
- Pajtinka. (2016). Military Diplomacy and Its Present Functions. *Dimensions: International & national Studies*, 179-194.
- Parameswaran. (2019, August 13). *What Did the new Sulu Sea Trilateral Land Exercise Accomplish ?* Dipetik July 07, 2021, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2019/08/what-did-the-new-sulu-sea-trilateral-land-exercise-accomplish/>
- Parawesmaran. (2019, June 17). *What Behind the Firs Sulu Sea Trilateral Land Exercise ?* Dipetik July 7, 2021, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2019/06/whats-behind-the-first-sulu-sea-trilateral-land-exercise/>
- Portal Kalimantan . (2018, April 5). *AL Tingkatkan Kerja Sama*. Dipetik 07 05, 2021, dari Portal Kalimantan: <https://rakyatkaltara.prokal.co/read/news/12265-al-tingkatkan-kerja-sama.html>
- Pusat Sejarah TNI. (2018, April 2). *Patroli Terkoordinasi Philindo XXXXII-18*. Dipetik July 7, 2021, dari Pusat Sejarah TNI: <https://sejarah-tni.mil.id/2019/01/28/kronik-april-2018/>
- Rahmayah. (2016, Mei 12). *Kerja sama trilateral di perairan Sulu ulangi keberhasilan di Selat Malaka*. Dipetik Desember 29, 2020, dari MaritimeNews:

<https://www.maritimnews.com/2016/05/kerja-sama-trilateral-di-perairan-sulu-ulangikeberhasilan-di-selat-malaka>

- Rajaratnan School of International Studies (RSIS). (2010). *Maritime challenges and priorities in Asia: Report of a conference organised by S. Rajaratnan School of International Studies (RSIS)*. Singapore: Nanyang Technological University.
- ReCAAP. (2018). *Incident Alert Abduction of Crew Fishing Trawler 11 September 2018*. Singapore: ReCAAP Information Sharing Center.
- ReCAAP, PCG, ASA, & SSA. (2019). *Guidence on Abduction of Crew in the Sulu-Celebes Seas and Waters off Eastern Sabah*. Singapore: ReCAAP Information Sharing Center.
- Sanchez. (2019, November 30). *Indonesia, Malaysia, Remain PHL's allies to Protect Philippine waters*. Dipetik July 07, 2021, dari Philippine Information Agency: <https://pia.gov.ph/news/articles/1030927>
- Sandongong. (2019, November 20). *PH hosts Indonesia in border security meet*. Dipetik Juli 06, 2021, dari News.MB Ph: <https://news.mb.com.ph/2019/11/20/ph-hosts-indonesia-in-border-security-meet/>
- Santosa. (2018, Juni 3). *Indonesia, Malaysia, Philippines to Conduct Military Exercise to Curb Militants*. Dipetik Juli 05, 2021, dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/seasia/2018/06/03/indonesia-malaysia-philippines-to-conduct-military-exercise-to-curb-militants.html>
- saragih. (2019, November 25). *Dua Kapal Perang Korvet Indonesia Merapat ke Malaysia*. Dipetik July 7, 2021, dari Jakarta Greater: <https://jakartagreater.com/dua-kapal-perang-korvet-indonesia-merapat-ke-malaysia/>
- Satari, E. (2017). *Security Cooperation in Sulu Sea*. . Hawaii: United States-Indonesia Bilateral Defence Discussion.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutrimo, Sitorus, H., & Ramadhan, M. W. (2018). Diplomasi Pertahanan dalam Kerja Sama Pertukaran Informasi Indonesia-Filipina Menghadapi Terorisme di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina. *Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan*, 41.
- Tan, S., & Sing, B. (2012). *Introduction Asian Security*. London: Rutledge Taylor and Francis Group.
- Tempo. (2016, Agustus). *Pertemuan Jokowi dan Duterte Hasilkan Tiga Kesepakatan*. Dipetik Maret 24, 2021, dari Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/803190/pertemuan-jokowi-dan-duterte-hasilkan-tiga-kesepakatan>.

- The Diplomat. (2018, September 02). *What next for the Sulu Sea Trilateral Patrols*. Dipetik Maret 14, 2021, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2018/09/what-next-for-the-sulu-sea-trilateralpatrols>.
- TNI Angkatan Udara. (2019, November 26). *Elang Malindo 2019 tingkatkan interoperability AU-TUDM*. Dipetik July 8, 2021, dari TNI Angkatan Udara: <https://tni-au.mil.id/elang-malindo-2019-tingkatkan-interoperability-tni-au-tudm/>
- UNCTAD. (2018, September 11). *Review of Maritime Transport 2018*. Dipetik september 27, 2020, dari UNCTAD: <https://unctad.org/webflyer/review-maritime-transport-2018>
- Wartawan Berita Sabah. (2019, juli 29). “6TH TRILATERAL MARITIME PATROL (TMP) PORT VISIT –INDOMALPHI” ERAT HUBUNGAN 3 NEGARA. Dipetik juli 07, 2021, dari berita sabah.com: <https://beritasabah.com/6th-trilateral-maritime-patrol-tmp-port-visit-indomalphi-erat-hubungan-3-negara/>
- Wartawan Berita Sabah. (2019, July 29). *6th Trilateral Maritime Patrol (TMP) Port Visit-Indomalphi*. Dipetik July 7, 2021, dari Berita Sabah: <https://beritasabah.com/6th-trilateral-maritime-patrol-tmp-port-visit-indomalphi-erat-hubungan-3-negara/>
- Widiyani. (2020, Agustus 13). *Dampak Positif dan Negatif Kondisi Geografis Indonesia*. Dipetik September 27, 2020, dari Travel detik: <https://travel.detik.com/travel-news/d-5131154/dampak-positif-dan-negatif-kondisi-geografis-indonesi>
- Wiranto, D. S. (2018). Effort to Overcome Piracy in the Indonesia-Philippines Maritime Borders. *International Journal of Advanced Research*, 241-251.